

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI,
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jengang Pendidikan Strata 1 (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

ZEFORA

NIM. 21520032

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI,
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jengang Pendidikan Strata 1 (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

ZEFORA

NIM. 21520032

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 9 Mei 2025

Jam : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.si

Ketua Penguji/Pembimbing

2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A


Penguji Samping I

3. Minardi, S.IP., M.Sc

Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zefora
NIM : 21520032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Zefora

NIM. 21520032

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Zefora
NIM : 21520032
Telp : 081347520597
Email : zeforaola@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“(Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Isitimewa Yogyakarta)”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan


Zefora

NIM. 21520032

MOTTO

ROMA 12:12

“Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

ROMA 5:3-5

“Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikarunikan kepada kita”

MATIUS 6:33

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

Marcus Aurelius

“Kebahagiaan dari hidupmu tergantung dari kualitas pikiranmu”

Zefora

“Memberi dengan keiklasan dari dalam diri tanpa pamrih, akan membawa kelimpahan yang lebih”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tepat waktu. Tuhan Yesus Kristus selalu membimbing penulis hingga sampai pada titik ini. Maka dari itu, skripsi ini saya persembahkan dan rasa terima kasih untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat luar biasa sosok inspirasi bagi saya dalam hidup, orang yang penuh keyakinan, kerja keras dan cerdas dengan segala kekurangan namun berfikir maju, tidak membiarkan keadaan membatasi mimpi anak-anaknya untuk hidup lebih baik, dan memberikan kepercayaan penuh untuk melangkah merai cita-cita, mereka adalah orang tua yang berjuang penuh semangat tidak akan membiarkan dalam tekanan dan selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya mereka itu ialah Bapak Daniel Alop dan Ibu Ruth Hoseya tercinta. Terima Kasih Atas Doa. Cinta Kasih Sayang, Motivasi Dan Pengorbanan Yang Selalu Diberikan Kepada Saya Dengan Tulus, Semoga Selalu Diberikan Kesehatan Dan Umur Panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Untuk semua keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi serta dorongan dan dana selama proses pendidikan di Yogyakarta. Senyuman dan harapan kalian kepada saya mejadi kekuatan yang sangat besar bagi perjuangan dalam pendidikan saya selama ini.
3. Untuk abang saya tercinta Apriyansen dan Keluraga kecilnya terima kasih atas dukungan, doa dan dana yang telah di berikan selama pendidikan saya serta adik tersayang Juliantino terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan meskipun tidak terlihat tapi selalu saya rasakan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkati dalam kehidupan mu.

4. Untuk Om Haris dan Tante Ester, Terima kasih atas dukungan doa maupun dana yang diberikan kepada saya, selama dalam pendidikan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas semua kebaikan tante dan om.
5. Baik semua om dan tante, mama tua dan bapak tua, nenek maupun sepupu. Terima kasih atas dukungan dan doa baik dana kalian semua, senyuman dan harapan kalian kepada saya selalu menjadi semangat saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas semua kebaikan kalian.
6. Untuk Dosen Pembimbing Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.si. yang selalu membimbing saya dan dengan sabarnya memberikan arahan demi arahan disertai bahasa-bahasa yang positif penuh lemah lembut keluar dari ucapannya, yang selama proses penyusunan proposal sampai skripsi. Semoga selalu diberkati dalam kehidupannya, segala yang baik dan berkat dari yang Maha Kuasa dilimpahkan kepada Ibu dan Keluarga, tetaplah menjadi Dosen yang optimis dengan mahasiswa dan memberikan kepercayaan dan kemudahan tapi tidak membiarkan mahasiswa bimbingannya berjalan sendirian tanpa kepastian. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan Ibu.
7. Untuk teman seperjuang UKM KP Filadelfia yang telah menjadi wadah untuk berorganisasi dan mendapatkan banyak hal berupa ilmu dan pengalaman serta tempat bertumbuh secara rohani yang sangat berharga dan pantas dibanggakan, berbagai dinamika kita lalui, susah dan senang kita lewati bersama, penulis menyadari betul masih banyak masih kurangnya kontribusi penulis selama berada dalam organisasi, semoga apa yang menjadi dan tujuan organisasi kita dapat terus diperjuangkan sampai semuanya tercapai.
8. Untuk teman-teman seperjuang dari awal kuliah sampai skripsi, Kamelia, Agnes, Ranti, Fidi, Anggi, dan Grit. Semoga semuanya selesai tepat waktu, semangat.
9. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Terima kasih atas tempat yang sudah disediakan untuk kami sebagai tempat tinggal selama dalam

pendidikan di Yogyakarta dan teman-teman Asrama Tenguyun Bulungan yang selalu ada dan berbagi pengetahuan dan pengalaman baik menjelajahi kota Yogyakarta dan sekitarnya bersama, selalu ada dalam suka dan duka selama kita tinggal bersama. Terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kalian semua, semangat.

10. Untuk semua Jemaat GKII Yogyakarta dan teman-teman GH Youth, Terima Kasih yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam kerohanian, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Kehadiran kalian memberikan ketenangan dalam keadaan tertekan.
11. Untuk orang-orang tersayang yang tidak penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam tulisan ini, kalian selalu ada dalam hati saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkata dan rahmat-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S.1).

Pada kesempatan yang mulia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr, Suturo Eko Yunanto, M.si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
5. Pemerintah Kalurahan Triwidadi dan Masyarakat Kalurahan Triwidadi

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Penulis



Zefora

NIM. 21520032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6

E. Manfaat Penelitian	6
F.Literatur Review	6
G. Kerangka Konseptual	14
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Unit Analisis.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Teknik Analisis Data	34
BAB II DESKRIPSI JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL	38
A. Sejarah Pembangunan Jalan Kalurahan Triwidadi.....	38
B. Visi-Misi Kalurahan Triwidadi	39
C. Kondisi Jalan Kalurahan Triwidadi.....	43
D. APBKL.....	48
E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi.....	50
BAB III ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI.....	56
A. Penetapan Lingkungan, dan Batasan Waktu Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan	56
B. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	62

C. Sumber Daya Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan	78
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	31
Tabel 2. 1 APBKal 2024.....	48
Tabel 2. 2 Data Penduduk dan Jumlah RT	50
Tabel 2. 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi	53
-----------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Jalan Kalurahan Triwidadi	43
Gambar 3. 1 Permohonan Rabat Beton.....	57
Gambar 3. 2 Jalan Cor Blok.....	59
Gambar 3. 3 APBKal 2024	63
Gambar 3. 4 Proposal Permohonan Pembuatan Jalan Pedukuhan.....	66
Gambar 3. 5 HOK Upah Tenaga kerja	68
Gambar 3. 6 Jalan Padukuhan Jagonandan.....	74
Gambar 3. 7 Gotong Royong Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan.....	79
Gambar 3. 8 Alat Dalam Pembangunan Jalan.....	82
Gambar 3. 9 Material Dalam Pembangunan Jalan.....	83

INTISARI

Peneliti mengkaji tentang strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu tugas dan fungsi pemerintah desa adalah sebagai pelaksana pembangunan, sebagai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kehidupan bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan desa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kalurahan Triwidadi menerapkan pembangunan khususnya dibidang infrastruktur jalan, Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi diantaranya jalan Kalurahan yang belum memadai terutama akses ke dusun-dusun, status jalan yang masih tanah milik pribadi, dan anggaran yang terbatas dari dana desa secara khusus untuk bidang pembangunan infrastruktur jalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan studi strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data. Adapun subjek penelitian ini berjumlah 11 orang informan.

Hasil dari penelitian menghasilkan temuan bahwa Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghasilkan 1) Penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pengerjaan jalan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah desa dan dilakukan dengan baik di karenakan dalam penentuan lokasi lingkungan pembangunan jalan mengutamakan lokasi yang urgen dan perlu diperbaiki melalui musrembang, adanya survei yang dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan jalan dari kalurahan untuk jalan yang di bangun serta waktu pengerjaan pembangunan jalan di kerjakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada perencanaan yang sudah ditetapkan. 2) Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu pemerintah desa sudah berupaya dalam melayani dan melindungi masyarakat, tetapi masih ada diskriminasi dari pemerintah desa bawah terhadap padukkuhan-padukkuhan tertentu dalam pembangunan infrastruktur jalan. 3) Sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu dari SDM adalah masyarakat Triwidadi sendiri sebagai pengerja jalan, sumber daya material dan alat yang sebagaimana matrial sudah termasuk dalam perencanaan dan anggaran dan alat diswadayakan oleh masyarakat.

Kata kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan, Infrastruktur Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak dalam wilayahnya berperan melaksanakan tanggungjawab mengurus, mengatur masyarakat dalam desa sebagai tujuan kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu harus dilindungi dan diberdayakan hendaknya membentuk demokratis, maju dan mandiri sehingga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan mengarah pada keadilan, makmur dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah bukanlah dibentuk untuk menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan pribadi namun kehadirannya untuk melayani publik dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pemerintah desa diperlukan dapat memiliki pemerintahan desa yang tangguh dan otonom dalam tujuan mewujudkan terciptanya kesejahteraan yang terus

meningkat dalam masyarakat serta tercapainya taraf hidup masyarakat yang layak.

Sesuai Pasal 79 Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa bertugas untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang sesuai dengan kewenangannya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang adalah pemaparan berasal dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Visi dan tujuan kepala desa terpilih diuraikan dalam RPJM Desa, sebuah dokumen perencanaan berisi kebijakan pembangunan desa dimasukkan ke dalam dokumen tersebut untuk melaksanakan arahan kepala desa. Menurut Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan seperti penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwasanya terdapat empat kewenangan desa salah satu di antaranya adalah Pelaksanaan Pembangunan Desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan standar hidup adalah tujuan dari pembangunan desa. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan daya saing desa melalui berbagai upaya, seperti

pembenahan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan jalan atau batu loncatan yang mendukung pekerjaan masyarakat, potensi desa menjadi dasar pembangunan ekonomi lokal, dan lingkungan serta sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan. Salah satu elemen kuncinya adalah pembangunan infrastruktur jalan, yang melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi harapan semua orang untuk dapat menikmati jalan yang aman dan nyaman oleh sebab itu masyarakat pastinya memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur jalan untuk mendukung dalam keberlangsungan kehidupan sehari-hari (Arini dkk, 2021)

Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan menjadi sangat penting sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat dalam mengakses jalan baik antarwilayah, dengan harapan dapat meningkatkan tenaga kerja serta infrastruktur jalan yang baik juga dapat memudahkan akses untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sumber daya. Pembangunan infrastruktur jalan juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan dan fasilitas yang sama dengan masyarakat di daerah perkotaan. Ini dapat membantu dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antarwilayah. (Siprianus, 2022).

Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang menerapkan pembangunan khususnya dibidang infrastrkut jalan, secara

topografi Kalurahan Triwidadi sebagian wilayahnya perbukitan termasuk akses jalan. Sebelumnya jalan di Triwidadi jalan tanah yang ketika hujan jalan berlumpur dan licin hingga berdampak bagi masyarakat yang berkendara roda dua maupun roda empat, dengan kondisi tersebut pemerintah desa Triwidadi berinisiatif melakukan penambahan berupa batu krikil untuk menimalisir jalan tanah yang berlumpur dan licin. Pada tahun 2016 pembangunan infrastruktur jalan di Triwidadi pertamakali dilakukan yaitu cor blok dua ruas jalan, untuk membawa material semen di jalan perbukitan pada masa itu menggunakan rel dari bambu karena keterbatasan alat, pada tahun 2018-2019. Pembangunan infrastruktur jalan terus diupayakan oleh pemerintah desa Triwidadi sampai saat ini masih dalam proses pemerataan pembangunan jalan menjadi cor blok full (Irwan, 2024, bidang pembangunan)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara awal dengan pemerintah desa dan masyarakat peneliti menemukan bahwa Kalurahan Triwidadi memiliki permasalahan jalan yang belum memadai yaitu jalan dalam pedukuhan-pedukuhan, kemudian permasalahan yang di hadapai pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Triwidadi yaitu status jalan tanah milik pribadi sehingga membuat pembangunan jalan terhambat, dan masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan juga yaitu anggaran yang terbatas dari dana desa secara khusus untuk bidang pembangunan infrastruktur jalan karena menyesuaikan regulasi kegunaan dana desa. Kemudian berdasarkan observasi yang di lakukan peneliti menemukan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu sumber daya

manusia (SDM) yaitu masyarakat Kalurahan Triwidadi ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong dan sumber daya material dan alat yaitu untuk material semen, pasir, dan batu split, dan untuk alat yang diperlukan berupa gerobak angkong, ember, sekop, resam, dan talang seng, excavator molen cor dan peralatan tukang. Pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi berfokus pada corblok *full*. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan” Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kajian penelitian ini dilihat dengan perspektif 5 G dimana dalam penelitian ini perspektif yang digunakan yaitu *Governing*, karena peneliti ingin melihat dan selanjutnya menggambarkan perbuatan pemerintah desa melalui strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul?

C. Fokus Penelitian

1. Penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pembangunan infrastruktur jalan

2. Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan
3. Sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk menggambarkan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi jalannya roda pemerintah desa.
3. Hasil penelitian ini dapat berdampak baik terhadap masyarakat agar memahami proses pembangunan sebagai sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan untuk keberlangsungan hidup masyarakat desa.

F. Literatur Review

Penulisan penelitian ini peneliti kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu terkait dengan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pembangunan infrastruktur jalan

Di dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 6 Nomor 4 Tahun 2022, yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Ditulis oleh Putri Esther Haloho, Hanny Purnamasari, dan Lina Aryani, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat seperti apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kertamukti dalam pembangunan infrastruktur, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, permasalahan dalam penelitian ini ketika pembuatan kebijakan masyarakat kurang berpartisipasi, adanya kesulitan ekonomi dan semangat didalam masyarakat, kekurangan dana pembangunan, dan keterbatasan prangkat desa kurangnya pengalaman dalam penerapan pembangunan infrastruktur, hasil dari penelitian ini menunjukkan, yaitu 1) tujuan dan sasaran, pemerintah desa Kertamuki sudah melakukan pembanguan infrastruktur sesuai kebutuhan di masyarakat, diantaranya PAMSIMAS dan perbaiki jalan dusun, serta jalan gang, 2) lingkungan, masyarakat setempat masih kurang dalam kerjasama gotong royong pembangunan, 3) kemampuan internal, adanya usaha prangkat desa untuk mengembangkan wawasan agar dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur dari kurangnya pengalaman, 4) pembuatan strategi, aparatur pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk ikut serta

membantu pembangunan, 5) Komunikasi, aparat pemerintah desa membangun komunikasi melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembang desa (musyawarah rencana Pembangunan desa).

Di dalam Jurnal *Governance Opinion*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023, yang berjudul Strategi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Hilimbowo Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias. Di tulis oleh Hadisman Gea, Rehmuli Karo Kora, dan Wati Darma Agung, penelitian ini bertujuan mengamati pola upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan prasarana jalan yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat ataupun lingkungan, sedangkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah kerusakan jalan Desa Hilimbowo mulai dari ruas-ruas jalan berlubang dikategorikan jalan yang tidak aman dan nyaman, bahkan hancur badan jalan akibat muatan transportasi yang berlebihan, serta kualitas bahan jalan itu sendiri kurang bermutu, disertai unsur tanah belum memadai akibat musim hujan membuat kualitas jalan rendah sehingga banyak korban kecelakaan sering dijumpai. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara informan dan teknik penentu narasumber adalah menggunakan *purposive sampling*, hasil dari penelitian ini adalah pemerintahan desa melakukan peningkatan pembangunan infarastruktur jalan di desa Hilimbowo yaitu memulai dari memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, transparansi pemerintah desa berkaitan intensi dari pembangunan, kepala desa menggambarkan rancangan pemerintah kepada

prangkat desa bagaimana langkah-langkah pembangunan, pemerintahan desa memberikan masukan dan dukungan pada masyarakat untuk ikut serta dalam tiap-tiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan jalan, juga menunjuk masyarakat yang aktif agar mengajak masyarakat lain untuk berpartisipasi menyumbang tenaga, waktu dan pikirannya.

2. Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan

Di dalam Jurnal Sektor Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024, dengan judul Strategi Pemerintah Desa Mendukung Pembangunan Jalan Di Desa Ogalali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Ditulis oleh Nihla, Nursam, Abd. Kahar, dan Arfan, penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa pemerintah desa membantu pembangunan infrastruktur jalan di desa Ogalali, dengan permasalahan yang ada yaitu terjadi jalan cacat yang belum di perbaiki dan memerlukan saluran mengalirkan air agar tidak terjadi penyumbatan, perencanaan pembangunan yang masih dalam keadaan tidak terpenuhi sampai saat ini, disebabkan kendala dana tidak cukup, juga partisipasi masyarakat masih rendah, dalam musrembang pembangunan jalan dan perbaikan jalan rusak masih kurang serta warga yang tidak mengizinkan penggunaan lahannya untuk di bangun jalan, jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memilih informan *purposive* dan mengumpulkan jenis data primer melalui observasi dan wawancara dan data sekunder berasal dari buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga tahapan pendekatan

strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mendukung pembangunan jalan Desa Ogalali yaitu di ambil dari teori (Syadat, F. A., & Izzati, 2023). 1) Strategi organisasi yang diterapkan adalah perencanaan yang ingin dicapai dalam pembangunan menggunakan proposal perencanaan yang sudah dirumuskan, tetapi perencanaan pembangunan jalan krusial menerima dukungan semua pihak agar pembangunan lekas di kerjakan. 2) Strategi program adalah taktik yang dilakukan pemerintah desa untuk mengurus sengketa tanah warga yang menjadi halangan dalam melakukan pembangunan jalan juga anggaran yang belum cair. 3) Strategi pendukung sumber daya adalah pendekatan pemerintah desa akan kecakapan, kemauan, ekspansi, tata laksana pengorganisasian modal. Dengan strategi sumber daya ini membantu orang terampil berkemampuan bersaing khususnya di Desa Ogalali.

Di dalam jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024, yang berjudul Strategi Pengembangan Organisasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai. Ditulis oleh Muthia Zahra, Angelin Sarawati, M Prayoga, M Ramadhan, Euis Salbiah, dan Cecep Wahyudin, tujuan dalam penelitian ini adalah agar mengetahui strategi pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai melalui tata kelola pemerintahan, Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, data dihasilkan dari teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, masalah dalam penelitian ini adalah keterbatasan keahlian beradaptasi dapat menghalangi pertumbuhan dan efektivitas dalam mencapai tujuan, hasil

dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan yang dikaitkan dalam penelitiannya, yaitu 1) Tujuan, dimana strategi tujuan yang dilakukan oleh Kecamatan Citeureup menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan perundang-undang yang berlaku, 2) lingkungan, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para kinerja pegawai seperti lembaga membuat pengelolaan tata ruang secara rutin serta pengawasan pembangunan sarana-prasarana, memberikan contoh kepedulian terhadap lingkungan fisik, 3). Pengarahan, yaitu kecamatan citeureup memberikan motivasi pada karyawan agar terciptanya inisiatif pegawai untuk bekerja lebih baik dan menyumbangkan tenaganya sungguh-sungguh agar mencapai tujuan organisasi, 4) Tindakan, dimana Kecamatan citeureup mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan dengan evaluasi, memberikan teguran pada pegawai yang kurang baik dalam pelayanan, 5) pembelajaran, mencakup manajemen waktu, kemampuan komunikasi, penguasaan komputer, sebagai upaya kecamatan citeureup memastikan pegawainya memiliki kemampuan yang relevan.

3. Sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan

Di dalam Jurnal Ilmiah Ilmu sosial, Politik dan Humaniora, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rancaasih Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Ditulis oleh Eva Monica, Gili Argenti, dan Marsingga, penelitian ini bertujuan menjelajahi dan menguraikan strategi yang digunakan oleh pemerintah desa di Kertamukti dalam pembangunan

infrastruktur. metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan hasil yang di dapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi, permasalahan dalam analisi ini adalah Desa Rancaasih termasuk desa pelosok sulit diakses bahkan tidak pernah dilintasi kendaraan umum luar karena keteringgal pembangunan infrastruktur diantaranya jalan desa, lapangan bola, program pemasokan air minum steril basis masyarakat, renovasi puskesmas, posyandu, renovasi aula desa, gedung serba guna, dan renovasi kantor desa, faktor dari terlambatnya pembangunan infrastruktur Desa Rancaasih disebabkan pandemi ditambah lagi kurangnya partisipasi gotong royong ataupun budaya gotong royong yang tidak dibiasakan serta rendahnya keaktifan warga desa setempat untuk membangun, hasil dalam penelitian ini menunjukan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancaasih untuk mempercepat pembangunan, pertama mereka mengutamakan anggaran untuk infrastruktur dengan sistem lobby kepada dewan memperoleh dana pembangunan, kedua lingkungan yaitu perbaikan jalan menggunakan cara hodmix agar hasil maksimal, ketiga kemampuan internal dari pemerintah desa yang menampung semua aspirasi masyarakat untuk di sampaikan kepada dewan dan pemerintah pusat, juga mengadakan rapat mingguan semua tokoh masyarakat, keempat penyusunan RPJMDes selalu melibatkan BPD, LPM, melaksanakan musrembang desa dan kecamatan untuk mempercepat pembangunan, dan yang terakhir komunikasi yang terus dieratkan.

Di dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora (J-PSH), Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021, yang berjudul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Di tulis oleh Yoga Hariyanto, Shulis, dan Figur Adhiyakam, tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan infrastruktur di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Rayu dengan menerangkan proyek-proyek yang akan dijalankan oleh pemerintah desa dan pengaruhnya atas masyarakat, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, permasalahan temuan ini adalah hadirnya covid-19 yang mengakibatkan anggaran proyek pembangunan infrastruktur desa diakhilkan ke masa pandemi untuk membantu masyarakat yang terpapar akibat pandemi, dampaknya membuat pembangunan infrastruktur yang dalam proses terhambat, adanya keterbatasan sumber daya yang dampaknya pada proyek hasil kurang optimal, keberlanjutan proyek pemeliharaannya, dan partisipasi masyarakat minim juga menjadi masalah, serta mengimbangi masukan masyarakat tentang kebutuhan yang mendesak, hasil dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Kalimas mencapai keberhasilan proyek pembangunan infrastruktur yaitu; pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pemadam kebakaran, pos keamanan masyarakat (poskamling), dan layanan ambulan, juga pemerintah desa berupaya aktif menerapkan kunjungan ke dusun-dusun untuk melakukan komunikasi secara langsung agar mengetahui pendapat masyarakat dan memastikan apakah proyek sejalan

dengan kebutuhan warga, namun di balik keberhasilan dalam proses pembangunan sempat tertunda karena pandemi menyebabkan krisis, setelah masa pandemi berakhir pemerintah tetap fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMDes.

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Desa adalah masyarakat kesatuan hukum yang memiliki hak dalam wilayahnya berkuasa untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berlandaskan norma dan adat istiadat serta mengakui dan menghormati peraturan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1.

Desa bukan hanya sekedar menjadi wadah tempat untuk tinggal atau status kedudukan melainkan didalamnya ada persatuan komunitas hukum yang mempunyai kekuasaan dalam membenahi dan memperjuangkan pemerintahan dan keperluan masyarakat yang dimaksud sebagai otonomi desa.

Menurut (Kasmira, 2020 n.d.) menegaskan “Pemerintah adalah kumpulan orang yang memegang esensial dalam negara yang mempunyai pengaruh melaksanakan tanggungjawabnya dan mempunyai kuasa yang absah menjaga serta meningkatkan nilai hidup masyarakat melalui perbuatan dan menjalankan beragam keputusan”. pemerintah yang berkuasa yang dimaksud yaitu untuk

memajukan, mensejahterakan, berlaku adil dan berpihak pada masyarakat sebagaimana wujud dari pemerintah itu sendiri.

Masyarakat berhak merasakan manfaat dari kewenangan pemerintah karena otoritas pemerintah tidak digunakan untuk melayani dirinya sendiri. Pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan merupakan beberapa fungsi dari pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah desa adalah organisasi mempunyai kewajiban yang amat mendasar dalam upaya melakukan pembangunan masyarakat, paling utama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk acuan kemajemukan kultur negara ini. berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa terdiri dari seorang pemimpin yang disebut Kepala Desa sebagai pemimpin paling atas pemerintahan desa, dan dibantu oleh prangkat desa yang bertugas sebagi bagian dari pemerintahan desa secara administrasi, desa tidak hanya terdiri dari kepala desa dan prangkat lainnya, melainkan juga hadir didalamnya yaitu bagian anggota yang dinamakan BPD badan permusyawaratan desa.

Adapun menurut Makarno (2017), menegaskan “pemerintah desa merupakan ikon formal legal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa berjalan didalam pimpinan seorang kepala desa bersama-sama dengan prangkat desa, yang sebagai prantara masyarakat berfungsi untuk hubungan

diluar ataupun didalam masyarakat yang berkepentingan”. Interpretasi atas pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakat setimbang dengan keadaan.

Dalam pengertian lebih luasnya lagi menurut Umar (2016), “pemerintah desa memiliki tanggungjawab utama dalam melaksanakan pemerintahan desa, yaitu 1) menjalankan urusan rumah tangga desa urusan pemerintahan umum, membangun dan memberdayakan masyarakat. 2) melaksanakan tugas bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat”.

Pemerintah Desa adalah bagian dari sistem yang menjalankan pemerintahan desa, maka dari itu desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai biro lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat diinginkan bisa melaksanakan roda pemerintah desa dengan benar-benar dan mampu membarui derajat hidup orang banyak ke arah yang lebih makmur, setara, adil, dan damai. Menjalankan pemerintahan desa tidak jauh dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan biro terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tunggul strategis bagi keberhasilan semua program. Oleh sebab itu upaya mengoptimalkan desa merupakan langkah mempercepat terbentuknya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi wilayah.

Berikut adalah Peran Pemerintah Desa sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Peran Pemerintah Desa :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwasannya pemerintah desa memiliki peran atau tanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan desa mengurus desa dengan melaksanakan pembangunan di desa adalah bentuk dari peran pemerintah desa untuk menyediakan sarana prasarana dalam desa, melalui pembangunan yang dimaksud yaitu seperti pembangunan jalan, pembangunan posyandu, pembangunan drainase, dan lain-lain untuk kepentingan publik. Pemerintah desa juga berperan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang sebagaimana dimaksud adalah meningkatkan kinerja seperti RT, RW, Karang taruna, dan PKK. Pembinaan ini bisa berupa pelatihan atau khursus, melakukan rapat koordinasi kesempatan pemerintah desa atau kepala desa untuk memberikan masukan dan dukungan maupun nasehat. Dan pemerintah desa berperan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, yang dimaksud pemerintah desa membantu masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya seperti UMKM maupu agrowisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Maka peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga tentunya dalam menjalankan tugasnya berperilaku akuntabelitas maupun transparan terhadap masyarakat

serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat sudah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai wujud *good governance*.

2. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pengertian Pembangunan adalah suatu mekanisme yang didalamnya ada usaha untuk membuat perkembangan melalui transformasi yang telah direncanakan untuk memperoleh kemajuan dalam suatu negara Hayati (2022:04).

Dalam penyelenggaraan pembangunan dibutuhkan upaya dalam prosesnya, upaya yang dimaksud adalah tindakan nyata dalam bidang pembangunan fisik, pembangunan non fisik, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan sosial menuju perubahan dan perkembangan dalam daerah.

Menurut Rosfa (2017) “Menekankan bahwa pembangunan merupakan reaksi multidimensi, yang dimaksud pembangunan sering melibatkan struktur sosial, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan sektor ekonomi, pemerataan pendapatan, dan finalisasi problem kemiskinan”. Artinya pembangunan sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia karena pembangunan mempengaruhi semua aspek penting dalam kehidupan.

Salah satu dari empat kewenangan desa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan desa. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa merupakan tujuan dari pembangunan di desa. Dalam pengertian yang lebih luas, “Pembangunan adalah pijakan atau usaha masa yang dilakukan

dalam perubahan pembangunan, manfaatnya untuk mengubah kondisi daerah setempat”, Mardikanto dan Soebianto (2017).

Dengan tercapainya pembangunan yang bernilai maka ada kesejahteraan atau kualitas hidup yang layak dalam masyarakat dan penyelenggaranya dilakukan oleh birokrasi atau kelompok-kelompok yang berwenang untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut Kuncoro (2019: 114) menegaskan, pembangunan desa bahwasannya merupakan inisiatif dari masyarakat dan pemerintah baik dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari desa, bantuan pemerintah maupun organisasi-organisasi untuk membuat perubahan kearah yang baik.

Pembangunan Desa diperoleh sudut pokok yang menjadi objek pembangunan baik pembangunan pada masyarakat maupun pembangunan aspek fisik, yaitu pembangunan dalam masyarakat yang dimaksud pemberdayaan dan di dalam desa itu sendiri salah satunya pembangunan jalan desa.

Pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 bahwa “pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana kehidupan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa”. Juga dalam PERMENDAGRI pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdapat didalamnya visi dan misi Kepala Desa, kebijakan pembangunan desa, serta kegiatannya meliputi bidang pelaksanaan pemerintah desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari keempat bagian

bidang tersebut, pemerintah desa memiliki tugas untuk menjalankan sesuai peraturan yang berlaku, secara khusus dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang dimana sudah tercantum sebagai berikut:

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- a. Pembangunan lingkungan;
 1. Tambatan perahu
 2. Jalan permukiman
 3. Jalan desa antar permukiman ke daerah pertanian
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 5. Lingkungan permukiman masyarakat desa
 6. Dan infrastruktur desa lainnya menyesuaikan kondisi desa
- b. Pembangunan prasarana kesehatan;
 1. Air bersih berskala desa
 2. Higienis lingkungan
 3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 1. Taman baca masyarakat
 2. Pendidikan anak usia dini
 3. Balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi;
 1. Pasar desa

2. Pembentukan dan pembangunan badan usaha milik desa
3. Penguatan pemodalan badan usaha milik desa
4. Pembibitan tanaman pangan
5. Pengiliran padi
6. Lumbung desa
7. Pembukaan lahan pertanian.

Pengertian Infrastruktur adalah suatu prasarana pokok biasanya diberikan untuk mendukung semua kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat. Infrastruktur segala jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu mempermudah kegiatan atau aktivitasnya secara umum (Hayati 2022:05).

Infrastruktur menjadi kebutuhan utama dalam sarana prasarana, lebih tepatnya infrastruktur merujuk pada fasilitas umum fisik yang dimaksud seperti jalan raya, jembatan, sekolah, pelabuhan, rumah sakit, dan sebagainya untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur bahwa “terdapat jenis infrastruktur ekonomi dan sosial yang termasuk diantaranya yaitu infrastruktur jalan”. Jelas bahwasannya infrastruktur jalan mempengaruhi ekonomi suatu negara maupun desa karena infrastruktur khususnya dibidang jalan menjadi aset publik yang bermanfaat untuk merangsang kegiatan perekonomian.

Menurut Gibbons (2017), menegaskan infrastruktur fisik, khususnya infrastruktur transportasi, memberikan sumbangan baik pada pembangunan ekonomi melalui investasi, lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja untuk aktivitas orang, barang, dan jasa dalam masyarakat. Suratno dalam Sumadiasa (2016:58) menyatakan bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Infrastruktur yang tidak layak digunakan harus diperbarui dan dikembangkan karena bentuk dari tugas dan tanggungjawab pemerintah, juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang sudah dibangun untuk membantu dan melancarkan kegiatan masyarakat.

Menurut Ronaldy Lovina (2023), Pembangunan jalan berguna untuk penompang bagi penyediaan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, persampahan, dan juga penyediaan jalur tanaman hijau pada umumnya yang ada pada pinggir atau pertengahan jalan yang di sepanjang area jalan.

Selain jalan yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat pembangunan jalan juga dapat menjadi tempat untuk fasilitas lainnya seperti yang dijelaskan oleh Ronaldy yang dimaksud adalah tempat berdirinya tiang listrik seperti PLN yang membutuhkan penghubungan jalan dari pusat sampai ke daerah dan desa, tempat untuk berdirinya tower jaringan dan kabel penghubung yang ada di atas menelusuri jalan, dan adanya tanaman sebagai pengamanan

pembatas antar jalur kiri dan jalur kanan agar para pengemudi tidak keluar jalur jalan menimalisir terjadinya kecelakaan.

Pengertian jalan didefinisikan sebagai salah satu sarana prasarana transportasi yang sangat penting bagi pertumbuhan bangsa dan negara, untuk memajukan persatuan dan persatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat, serta untuk pluralitas kesejahteraan umum, terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Menurut Siprianus (2022), Di Indonesia pembangunan infrastruktur jalan menjadi sangat penting sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat dalam mengakses jalan baik antar wilayah, dengan harapan dapat meningkatkan tenaga kerja serta infrastruktur jalan yang baik juga dapat memudahkan akses untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sumber daya.

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia berkontribusi pada masyarakat daerah terpencil untuk mengakses layanan dan fasilitas yang sama dengan masyarakat di daerah perkotaan, ini juga dapat membantu dalam mengurangi ketidasetaraan antar wilayah.

Menurut Miko (2019), “menegaskan pembangunan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang mengarah pada kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara”.

Infrastruktur jalan menjadi bagian terpenting dalam proses ini karena dapat memfasilitasi mobilitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan pelayanan dan penyerapan tenaga kerja, serta mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Leali Aizah (2018) menegaskan infrastruktur merupakan semua struktur ataupun fasilitas penting, fisik maupun sosial, contohnya bangunan, suplai air, jalan, dan lainnya yang berguna untuk operasional kegiatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan jalan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yaitu: peraturan jalan, pembinaan dalam pembangunan jalan maupun pengawasannya dalam proses pembagungan jalan, penyelenggaraan jalan di Indonesia mestinya sesuai pilar kegunaan, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab. Tujuannya agar mendapatkan capaian dalam peradilan pembangunan jalan yang didalamnya diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Walid (2016), mengatakan jalan yang layak, aman sudah seharusnya dijaga melalui pemeliharaan, perawatan jalan secara terus-menerus, sebab jalan memiliki fungsi yang amat diperlukan dalam mendorong perkembangan dan kemajuan dalam daerah.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka, pembangunan infrastruktur jalan sangat penting bagi kehidupan orang banyak karena jalan menjadi tolak ukur yang sudah melekat dalam masyarakat untuk bertahan hidup, melalui fasilitas infrastruktur jalan merupakan tombak utama untuk mencari nafkah kebutuhan hidup para petani, buruh, dan karyawan tetap yang bekerja melewati jalan darat untuk sampai ketempat kerja sebagaimana upaya memenuhi kebutuhan dalam keluarga maupun untuk meningkatkan ekonomi. Maka dari itu

pembangunan infrastruktur jalan harus terus dilakukan baik melalui pembenahan jalan mau pemeliharaan jalan.

3. Strategi

Pengertian strategi adalah rancangan yang disusun, bersamaan dan selaras yang berkaitan dengan mutu strategi organisasi terhadap tantangan lingkungan, telah dirancang untuk menyakinkan bahwa tujuan utama organisasi tercapai melalui implementasi yang tepat. (Lawrence & Glueck, 2019).

Demikian organisasi dalam Pemerintah yang dimana untuk menyelesaikan sebuah masalah, membutuhkan strategi yang didapatkan melalui keselarasan dalam menentukan langkah-langkahnya salah satunya dengan melihat keadaan lingkungan, faktor yang menjadi penghambat jalannya strategi sehingga dapat di atasi terlebih dahulu agar strategi yang sudah ditentukan dapat berjalan lancar dan efektif.

Menurut Marpaung (2022) menegaskan “strategi adalah tali panjang dalam menggapai target”. Menurut Rangkuti D.F (2020) “strategi merupakan perkakas untuk memperoleh tujuan akhir dalam perkembangannya, dan ide menyatuhkan strategi agar terus berkembang”. Menurut Effendi dkk (2022), Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk menggapai tujuan tertentu. Dapat diartikan strategi adalah tatana sebagai alat untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan, semakin strategi terus dilakukan dalam jangka panjang maka semakin mempercepat untuk sampai ke tujuan dan akan terus selalu berkembang, seperti dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah

pemerintah tentunya pembangunan dapat selesai karena adanya upaya yang pasti bahwa sebelum membangun pemerintah tersebut menyusun cara-cara sebagai strategi untuk menentukan apa yang diperlukan keberhasilan dalam pembangunan.

Menurut pendapat, Hutapea dkk, (2017) menegaskan “strategi adalah jawaban secara berulang kali ataupun ductile terhadap prospek dan acaman ekstern berserta kemampuan dan kelemahan internal yang menjadikan kosekuensi perkembangan organisasi.

Dengan kata lain strategi bukan sekedar rencana statis, melainkan proses dinamis yang terus disesuaikan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Organisasi yang efektif akan secara terus-menerus menganalisis lingkungannya dan menyesuaikan strateginya untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

Demikian arti luas strategi menurut Salusu dalam Putri Ester dkk (2022), “Strategi dalam pemerintahan didefinisikan sebagai suatu proses atau sebuah perjalanan yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan tindakan yang diambil untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pemerintah dapat dipengaruhi oleh yaitu: 1) lingkungan, tanpa mengabaikan hubungannya dengan sumber daya organisasi itu sendiri, lingkungan telah dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi operasinya. Karakteristik lingkungan terdiri dari dua elemen pertama adalah lingkungan eksternal, yang

merupakan lingkungan di luar tembok organisasi dan memiliki dampak yang signifikan terhadapnya, terutama dalam hal organisasi dan proses pengambilan keputusan. Kedua adalah lingkungan internal, atau lingkungan yang ada di dalam organisasi. 2) kemampuan internal, yaitu kapasitas untuk memeriksa suatu masalah yang muncul, biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin dan terkait dengan pengembangan misi, tujuan, dan nilai-nilai. 3) pembuat strategi, yaitu peranan pemimpin karena pada akhirnya yang dapat menentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang organisasi adalah para pemimpin yang memainkan peran penting dalamnya, tanpa pembuat strategi yang benar dan tepat maka suatu strategi tidak akan berjalan lancar. 4) untuk mencapai tujuan yang diinginkan, komunikasi sangat penting bagi keberadaan manusia. komunikasi yang buruk dapat membuat terhambatnya penyelesaian dalam masalah.

Strategi tentunya dibuat oleh seorang pemimpin yang memiliki kemampuan maupun sekelompok orang yang memiliki wewenang atau sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan tanpa strategi sulit untuk sampai ketujuan yang diinginkan, hadirnya strategi berasal dari masalah yang ada sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, seperti masalah pembangunan jalan yang terhambat karena dipengaruhi oleh lingkungan, sumber daya terbatas, komunikasi dan lain lain, Maka dari itu dibutuhkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Menurut Geoff Mulgan dalam Muthia Zahra, dkk (2022), menegaskan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator yaitu: yang pertama *Purposes* (Tujuan), adalah pernyataan mengenai keadaan suatu

organisasi berjuang mencapai keinginan sebagai upaya untuk masa depan organisasi tersebut. Kedua *Environment* (lingkungan), adalah tempat yang berada disekeliling dalam lingkup itu saja dan lingkungan bisa di ukur dari transformasi yang terjadi di kondisi sekitar. Ketiga *Direction* (pengarahan), adalah dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang atau pemimpin untuk mengarahkan orang menyetujui rencananya berguna untuk kepentingan jangka panjang. Keempat *Action* (tindakan), adalah sebuah perbuatan yang dimana menanggapi suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi. dan terakhir *Learning* (pembelajaran), adalah proses interaksi untuk mendapatkan pegentahuan.

Penegasan, strategi pemerintahan dapat digunakan sebagai alat dalam menyelesaikan masalah atau untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah tujuan organisasi atau pemerintahan sebagaimana yang dimaksud strategi pemerintah seperti dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang pertama pemerintah bisa menggunakan strategi tujuan dengan fokus ke penyelenggaraannya segala sesuatu yang diupayakan telah ditetapkan agar konsisten sehingga berhasil membuat perubahan dalam pembangunan tersebut sebagai kebutuhan masyarakat, kedua strategi pemerintahan dalam lingkungan yaitu penetapan lingkungan sebagai batasan dan waktu yang mana dimaksud lebar jalannya dan waktu pegerjaannya untuk mengetahui berapa lamanya proses pembangunan yang dibutuhkan dalam lingkungan itu serta sesuai keadaan lingkungan tersebut, ketiga pengarahan yang mana dimaksud pemerintah mampu mengayomi masyarakat dan dekat dengan masyarakat untuk mendukung kelancaran

pembangunan infrastruktur jalan sebagai kebutuhan jangka panjang, keempat strategi pemerintahan melalui tindakan yang dimaksud yaitu tanggapan pemerintah untuk menggapai sasarannya dan seperti apa jika ada permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan respon pemerintah untuk menyelesaikannya, yang terakhir pembelajaran yang dimaksud seperti, yaitu mencari informasi, membangun relasi yang baik dengan para tokoh yang memiliki wewenang serta masyarakat agar mendapatkan wawasan, dukungan dan ide baru untuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur jalan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pengertiannya dalam Sugiyono (2019), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada ideologi postpositivisme yang di gunakan untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah dimana peneliti sebagai pelaku kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada arti dari generalisasi.

Metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menggambarkan bagaimana perbuatan pemerintah desa melalui strategi pemerintah desa dalam

pembangunan infrastruktur jalan Di Kalurahan Triwidadi, dan melihat bagaimana proses pembangunan jalan yang di kerjakan di Kalurhan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah keadaan yang mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2019) objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang berupa ciri, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya objek penelitian merupakan target ilmiah untuk memperoleh data dan mengenal apa, siapa, kapan, dan dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah *governing* atau perbuatan Pemerintah Desa, yaitu mengenai strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari Pemerintah Kalurahan Triwidadi ada 4 orang, Tim teknis pelaksana pembangunan jalan 2 orang, ketua LPMK (Lembaga Pembangunan Masyarakat Kalurahan) 1 orang, dan yang terakhir masyarakat Triwidadi 4 orang.

Tabel 1. 1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Slamet Riyanto	Lurah
2.	Anita Yulia Fatmawati	Carik
3.	Mulyadi	Ulu-ulu
4.	Sarwedi	Pangripta
5.	Irwan	Staff Kalurahan Koordinator pelaksana bidang Pembangunan
6.	Endung Dasuki	Tim teknis pelaksana Pembangunan Jalan
7.	Abdul Rohman	Ketua LPMK (Lembaga Pembangunan Masyarakat Kalurahan)
8.	Sarjun	Masyarakat
9.	Winarni	Masyarakat
10.	Anom	Masyarakat
11.	Abdul Azis	Masyarakat

Sumber : Data peneliti 2025

c. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan infoman sebagai mana informan yang telah dipilih peneliti, dianggap dapat memberikan infromasi relevan serta spesifik terkait dengan

topik penelitian tentang strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan sistem penelitian. Observasi adalah situasi pengamat menggunakan indera pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap sebagai teknik pengumpulan data. Menurut Suliyanto (2018) mengatakan, agar hasil observasi dapat dipertanggungjawabkan maka sebaiknya observasi berupaya dilakukan ke banyak orang sekiranya yang berhubungan, sehingga dapat dibandingkan. Semakin banyak hasil pengamatan yang sama diantara observasi maka semakin dapat dipercaya hasil observasi tersebut.

Dalam penelitian ini yang peneliti observasi adalah melihat fenomena yang terjadi di Kalurahan Triwidadi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang termasuk didalamnya yaitu peneliti mengamati langsung lingkungan jalan Kalurahan, melakukan pendekatan kepada pemerintah desa dan masyarakat dengan cara komunikasi langsung secara informal maupun formal.

Dari observasi peneliti telah menemukan bahwa Kalurahan Triwidadi terdiri dari 22 padukuhan yang didalamnya membutuhkan pembangunan jalan agar dapat menghubungkan kegiatan perpindahan

masyarakat dan selain itu masyarakat Triwidadi berprofesi diperternakan, pertanian, dan ada juga yang bekerja diluar Kalurahan Triwidadi yang menggunakan jalan untuk beraktivitas seperti dalam menggunakan transportasi darat.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam, Sugiyono (2016:329). Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan responden atau disebut percakapan *interview* yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden secara langsung.

Dalam penggalian informasi peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa para narasumber di antaranya pemerintah desa dan masyarakat Kalurahan Triwdadi, yang dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang ada, setelah mengajukan pertanyaan, informan bercerita dan menjelaskan secara rinci mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi.

Wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan menggunakan waktu yang tidak tetap, selama jalanya proses wawancara

peneliti berupaya melakukan tanya jawab kepada pemerintah desa dan masyarakat Kalurahan Triwidadi untuk mengetahui bagaimana perbuatan pemerintah desa melalui strategi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perolehan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, gambar, tulisan, laporan, dan keterangan lain yang dapat mendukung penelitian, Sugiyono (2019). Dokumentasi berupa pengumpulan data melalui pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi khusus pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti yang disertai keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya (KBBI 2024)

Dokumentasi bermanfaat untuk mendukung dalam proses pelaksanaan penelitian, pada tahap dokumentasi ini peneliti telah mengumpulkan beberapa dokumen secara langsung di Kalurahan Triwidadi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti RPJMKal dan APBKal yang dimana dokumen ini berguna untuk mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan melihat bagaimana kondisi keadaan yang ada, dan selanjutnya peneliti juga melakukan pengumpulan dokumentasi pada saat proses wawancara maupun dengan informan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang telah digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif melalui penelitian kualitatif, yang

dimana menggunakan data bersamaan dengan informasi yang didapatkan secara langsung dari pertanyaan kepada narasumber, sesudah mendapatkan data tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori setelah itu peneliti memaparkan kenyataan yang ada di lapangan.

Dalam pemungutan data dilakukan secara langsung di Kelurahan Triwidadi dengan cara menentukan informan-informan sebagai narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan data yang diperoleh lalu diolah dengan analisis data-data yang penting serta melihat teori yang dipakai berlandaskan data yang diperoleh.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) reduksi data merupakan data yang disimpulkan dan memilih hal-hal pokok yang penting berkaitan dengan topik penelitian serta tema dan polanya, dengan tindakan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, juga dapat memudahkan pengumpulan data. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah pada temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menemukan sesuatu yang belum pernah diteliti atau tidak diketahui dan belum memiliki pola, oleh sebab itu inilah yang perlu dijadikan peneliti dalam menjalankan reduksi data.

Pada tahapan reduksi data peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan dalam penelitian yang berhubungan dengan strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan kemudian data yang ada dikumpulkan dan dilakukan analisis untuk melihat mana data yang penting dan tidak penting, sehingga data yang akan digunakan dapat

mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran data yang ada sehingga memberikan kesimpulan yang tepat dan bisa terverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu aktivitas dalam melakukan penelitian, apa yang diteliti oleh peneliti bisa dimengerti serta dianalisis sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan penjelasan singkat, bagan, ikatan antar bilangan, dan diagram. Menurut Miles & Huberman (Sugiyono 2016), teks atau kata-kata adalah format yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti dalam memahami apa yang akan diteliti.

Penyajian data yang telah dilakukan peneliti adalah melihat bagaimana keadaan yang terjadi dilapangan, sehingga data yang diperoleh dari observasi, dan wawancara dapat disajikan, namun data yang didapatkan tidak bisa langsung digunakan utuh sebab data yang diperoleh masih perlu untuk dipilih-pilih yang paling dibutuhkan. Dengan adanya tahapan reduksi yang ada, dan data yang ditemukan dilapangan dapat untuk menarik kesimpulan dari hasil temua.

c. Penarikan Kesimpulan

Tingkatan akhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan. Artinya menarik bermakna membahas kembali dalam bentuk meringkas dari bagian yang sudah ada kebagian lain lebih terperinci singkat, padat, dan jelas. Yang

di ringkas dalam penelitian seharusnya ada di dalam bagian pembahasan dan analisis.

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, sebab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat terus berkembang setelah penelitian dilapangan.

Menarik kesimpulan telah peneliti lakukan di tingkatan terakhir dalam menganalisis data, data yang telah diperoleh peneliti tersebut disimpulkan dan peneliti mengembangkan data-data yang ada dan megamati sehubungan dengan teori yang berkaitan dan mengevaluasi data tersebut, sesudah data yang ada dianalisis dan dievaluasi maka memberikan kesimpulan dengan data yang telah didapatkan.

BAB II

DESKRIPSI JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Pembangunan Jalan Kalurahan Triwidadi

Sejarah pembangunan jalan di Kalurahan Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencerminkan perjalanan panjang infrastruktur yang berusaha menghubungkan masyarakat dan mendukung perkembangan daerah. Berikut adalah perjalanan pembangunan jalan di Triwidadi:

Masa Awal (Sebelum 1900): Pada masa ini, jalan yang ada bersifat alami dan belum terstruktur, terutama berupa jalan setapak dan jalur ladang. Masyarakat menggunakan jalur ini untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pertanian dan perdagangan lokal. Era Kolonial (1900-1945): Pada masa penjajahan Belanda, beberapa jalan mulai dibangun untuk kepentingan ekonomi, seperti pengangkutan hasil pertanian ke pasar. Ini termasuk pembangunan jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Masa Kemerdekaan (1945-1960): Setelah kemerdekaan, fokus pembangunan infrastruktur mulai bergeser. Pemerintah lokal berupaya memperbaiki dan memperluas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan. Perkembangan Sejak 1970-an: Program pembangunan infrastruktur secara lebih terencana dimulai. Jalan-jalan diperbaiki, dan proyek peningkatan kualitas dilakukan dengan bantuan pemerintah pusat dan lokal. Masyarakat

berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong untuk pembangunan jalan desa. Reformasi dan Desentralisasi (1998-sekarang): Setelah reformasi, ada peningkatan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Kalurahan Triwidadi mendapatkan alokasi dana untuk memperbaiki jalan, memperlebar akses, dan meningkatkan keselamatan. Pembangunan Modern: Dalam dua dekade terakhir, pembangunan jalan semakin modern dengan penggunaan teknologi, seperti paving block, penerangan jalan, dan marka jalan. Ini juga mencakup akses ke fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. Dampak Pembangunan: Pembangunan jalan di Triwidadi berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta memperlancar akses transportasi. Masyarakat merasakan manfaat dalam aspek pendidikan dan kesehatan berkat kemudahan akses.

Pembangunan jalan di Kalurahan Triwidadi terus berlanjut dengan melalui perjalanan yang panjang dari masa ke masa, sejalan dengan visi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas di daerah tersebut.

B. Visi-Misi Kalurahan Triwidadi

1. Visi Kalurahan Triwidadi

Mewujudkan Kalurahan Triwidadi “SMART” yang artinya SMART merupakan singkatan dari kata Sejahtera, Mandiri, Aman, Religius, dan Tangguh yang dari kata tersebut masing-masing memiliki makna dan arti untuk tujuan pembangunan di Kalurahan Triwidadi dalam periode 2022

sampai 2026 visi ini juga merupakan berkelanjutan dari Visi Pembangunan Kalurahan Triwidadi pada masa sebelumnya tahun 2014-2020 Mewujudkan Kalurahan Triwidadi menuju Kalurahan Triwidadi Lebih Baik Mandiri dan Berbudaya.

Adapun makna dan arti kata dalam Visi Pembangunan Kalurahan Triwidadi tersebut, yaitu :

- a. Sejahterah, adalah merujuk pada ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana semua orang dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Dalam Pembangunan Kalurahan Triwidadi diinginkan masyarakat mempunyai suatu kondisi perekonomian yang stabil dapat menyanggupi kebutuhan dan biaya hidup, kondisi masyarakat yang sehat secara fisik maupun lahir dan batin serta bisa mengungkapkannya dalam kehidupan masyarakat dengan disertai turut dalam berbagai kegiatan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dengan kerukunan kehidupan bermasyarakat.
- b. Mandiri, merupakan arti dalam keadaan berdiri sendiri, tidak terikat dan bergantung pada orang lain. Dalam pembangunan Kalurahan Triwidadi diperlukan terciptanya suatu kondisi semua kebutuhan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dapat dipenuhi dari wilayah Kalurahan Triwidadi ataupun masyarakat memiliki kemampuan daya beli terhadap kebutuhan masyarakat atau keluarga melalui dorongan keadaan ekonomi atau keuangan yang mapan serta bisa mengurus dan meggunakan sumber daya yang ada dengan daya dukung pendidikan,

ketrampilan, akses jaringan komunikasi kerjasama dan akses permodalan. Salah satu contohnya terwujudnya ketersediaan pangan atau makanan yang diproduksi di wilayah Triwidadi sebagai hasil mandiri masyarakat yang disebut swasembada pangan seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain.

- c. Aman, yang dimaksud adalah terhindar dari segala ancaman, bahaya, terlindungi dari semua yang mengancam hak asasi manusia, keselamatan jiwa raga, kekayaan, usaha, persatuan kesatuan, kultur, sumberdaya alam dan lain sebagainya. Dalam pembangunan Kalurahan Triwidadi cenderung kearah terbebasnya Kalurahan Triwidadi dari berbagai tindakan kriminalitas kejahatan serta melindungi segenap masyarakat Triwidadi dari berbagai bahaya seperti ancaman dengan berupaya melakukan pengawasan, perlindungan, pengamanan, pengontrolan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Religius, yang dimaksud adalah Keagamaan, Kepercayaan dalam keyakinan beragama merupakan dasar utama dalam menjalankan kehidupan manusia begitu juga dalam simbol-simbol Pembangunan Kalurahan Triwidadi melalui pengetahuan bahwasannya segala yang terjadi baik dalam kehidupan maupun terselenggaranya pembangunan semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui proses usaha manusia dan didukung dengan alam.

- e. Tangguh mengandung arti kuat, cakap, tahan, sah, berenergi dalam melaksanakan roda pembangunan kalurahan dan masyarakat serta mampu dalam hal menghadapi tantangan dan rintangan sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin.

2. Misi Kalurahan Triwidadi

Misi Kalurahan Triwidadi merupakan pemaparan yang akan dilakukan sebagai tindakan mewujudkan visi yang telah di buat untuk mencapai tujuan dalam roda pemerintah Kalurahan sesuai dengan proritas, dan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mewujudkan pembangunan Kalurahan Triwidadi, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan dan membuka akses guna pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan bagi masyarakat Kalurahan Triwidadi
- b) Peningkatan kualitas dan tingkatan kesehatan untuk masyarakat
- c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan peningkatan Pendidikan, ketrampilan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal.
- d) Peningkatan layanan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan
- e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui pertumbuhan industri UMKM, perdagangan, dan jasa agar terciptanya lapangan kerja dan pendapatan keluarga bagi masyarakat.
- f) Fasilitasi Kerjasama dalam pengembangan usaha dan penguatan jaringan usaha

Jalan Nasional lintas tengah, yang dikenal sebagai Jalan Wates, dan Jalan Nasional lintas selatan, yang disebut Jalan Srandakan, berfungsi sebagai penghubung penting bagi Kalurahan Triwidadi, mengaitkan daerah tersebut dengan sejumlah jalan kabupaten yang lebih luas. Kedua jalan nasional ini memainkan peran strategis dalam memperlancar aksesibilitas, tidak hanya di dalam Kalurahan Triwidadi, tetapi juga menghubungkan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk kalurahan atau kapanewon yang berbatasan langsung dengan Triwidadi.

Dalam Kalurahan Triwidadi, kondisi jalan umumnya terjaga dengan baik. Jalan di Kalurahan Triwidadi dibangun dengan menggunakan aspal khusus untuk jalan lintas Kabupaten dan Provinsi yang di bangun oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang melintasi di daerah Triwidadi dan corblok khusus jalan permukiman atau jalan desa dalam Kalurahan Triwidadi atau jalan lingkungan yang ada di setiap padukuhan, memberikan permukaan yang lebih halus dan lebih nyaman untuk dilalui. Meskipun begitu, ada beberapa bagian jalan yang mengalami kerusakan, terutama di daerah perbukitan yang memiliki kontur tanah tidak rata. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi dan kurangnya pemeliharaan rutin. Meskipun demikian, mayoritas jalan di kalurahan ini masih dalam keadaan layak untuk dilalui oleh warga. Jalan-jalan tersebut, meski ada beberapa yang mengalami kerusakan, tetap dapat digunakan untuk perjalanan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kombinasi dari jalan nasional yang menghubungkan daerah yang lebih luas dengan kualitas jalan lingkungan yang baik di dalam kalurahan menciptakan sebuah jaringan transportasi yang memungkinkan mobilitas warga yang cukup efisien. Hal ini tentunya juga memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di Kalurahan Triwidadi, memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas dengan lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

1. Jalan Utama

Jalan utama yang menghubungkan Triwidadi dengan daerah lain umumnya telah beraspal dan cukup lebar antara 5 hingga 7 meter untuk dilalui kendaraan, jalan utama yang dimaksud adalah jalan lintas kabupaten dan provinsi yang melintasi jalan di Kalurahan Triwidadi.

Jalan utama selain menjadi yang melintasi antar wilayah juga berfungsi bagi masyarakat Triwidadi sebagai jalan Kalurahan, meskipun terdapat lubang-lubang kecil akibat cuaca dan penggunaan kendaraan berat dan beberapa area masih kekurangan rambu lalu lintas dan penerangan, sehingga saat malam hari, pengendara harus lebih berhati-hati.

2. Jalan Desa

Jalan-jalan yang masuk ke wilayah permukiman dan pedesaan belum merata corblok masih terdapat beberapa berbentuk jalan tanjakan yang terbuat dari batu atau tanah. Saat musim hujan, jalan-jalan becek dan sulit dilalui yang dapat mengakibatkan kendaraan terjebak, terutama mobil kecil. Aksesibilitas jalan desa dengan lebar sekitar 2-3 meter ini menjadi

persoalan tantangan bagi kendaraan roda empat, tetapi untuk sepeda motor dan pejalan kaki masih dapat melaluinya. Sistem drainase di beberapa jalan juga masih kurang optimal, yang dapat menyebabkan genangan air saat hujan deras. Beberapa titik jalan bahkan mengalami banjir kecil, sehingga menjadikan akses ke area tersebut terganggu maupun vegetasi tanaman di sekitar jalan kadang menjulang tinggi, menghalangi pandangan dan mempersempit jalur, terutama saat berkendara.

3. Aktivitas Ekonomi dan sosial (Pasar dan Transportasi)

Kalurahan Triwidadi pada hari tertentu, jalan menuju pasar menjadi padat dengan lalu lintas yang dimana pedagang, pembeli, dan kendaraan berbaur. Sehingga hal ini membuat beberapa titik menjadi macet dan menyulitkan kendaraan untuk bergerak. Selain itu di beberapa bagian jalan, truk pengangkut hasil pertanian sering melintasi untuk membawa dan diberikan pada konsumen atau pasar, yang membuat memperparah kerusakan jalan, terutama di area yang tidak diaspa.

4. Letak Wilayah Kalurahan Triwidadi

Kalurahan Triwidadi terletak di -7.854149” S 110’12’40.8”E, memiliki luas wilayah 111.9675 Ha. Wilayah Triwidadi memiliki bentang alam yang terdiri dari pegunungan atau perbukitan dan dataran rendah, dan berada disisi barat Kabupaten Bantul dengan batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara : Kalurahan Argorejo dan Argomulyo, Kapanewon

Sedayu

Sebelah Selatan : Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan

Sebelah Barat : Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu

Sebelah Timur : Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan

5. Topografi Kalurahan Triwidadi

Kalurahan Triwidadi berada di ketinggian : 60-160 permukaan laut

Rata-rata wilayah Kalurahan Triwidadi perbukitan : 80 %

Rata-rata suhu di Kalurahan Triwidadi antara : 19°C-32°C

Tingkat kelembapan udara antara : 55%-85%

Rata-rata kecepatan angin antara : 8 km/jam-20 km/jam.

Kalurahan Triwidadi mempunyai ketinggian antar 60 sampai dengan 160 dari permukaan laut. Wilayah Kalurahan Triwidadi mendekati 80% merupakan daerah perbukitan dengan bentang alam lereng bukit, punggung bukit, lembah dan dataran dengan suhu rata-rata antara 19°C s/d 32°C, tingkat kelembapan antara 55 % sampai dengan 85% dan kecepatan angin rata-rata 8km/jam s/d 20km/jam. Di lembah antara bukit dengan bukit berpotensi mengalir sumber mata air dan benteng daratan lembah sebagai lahan pertanian pangan. Kalurahan Triwidadi juga memiliki berbagai ekosistem dan habitat satwan liar hutan dan satwan air walaupun akhir-akhir ini mulai pengurangan habitat satwan karena pemburuan dan imigrasi.

6. Geologi Struktur Tanah Kalurahan Triwidadi

Tanah diwilayah Kalurahan Triwidadi terdiri dari wilayah dengan tanah kapur berbatu dan padas, tanah liat berwarna hitam dengan lapisan

krikir, tanah liat berwarna coklat, disertai tanah coklat berpasir yang secara umum tanah di Kalurahan Triwidadi tergolong subur berpotensi bisa ditanami tanaman pertanian, perkebunan, hortikultural dan tanaman belantara. Serta bahan tambang yang ada di kalurahan Triwidadi seperti batu kapur, batu hitam, dan pasir.

7. Penggunaan Lahan Kalurahan Triwidadi

Penggunaan lahan di Kalurahan Triwidadi sebagian besar merupakan hutan rakyat yang luasnya hampir mencapai ± 800 Ha, lahan pertanian seluas ± 223 Ha, permukiman ± 51 Ha perkantoran dan pendidikan $6 \pm$ Ha dan peternakan ± 10 Ha.

D. APBKal

Tabel 2. 1
APBKal 2024

URAIAN	ANGGARAN (RP)
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Kalurahan	RP. 284.000.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 135.000.000
Dana Desa	Rp . 1.689.878.600
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 370.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 2.130.000.000
Pendapatan Lain-lain	Rp. 27.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 7.197.678.900

BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.353.916.466
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 3.715.467.255
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 544.820.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 552,280.124
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan , Dan Mendesak Kalurahan	Rp. 286.275.440
Jumlah Belanja	Rp. 7.452.759. 285
DEFISIT PEMBIAYAAN	Rp 255.080.385
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 405.080.385

Sumber : APBKal Tahun 2024

Berdasarkan table diatas pendapatan desa yang diperoleh ada beberapa pendapatan seperti pendapatan asli kalurahan, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten dan bantuan lainnya. Jumlah pendapatan yang ada sebesar Rp. 7.197.678.900, dan jumlah belanja desa sebesar Rp. 7.452.759. 285, dapat dilihat bahwasannya jumlah belanja desa lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh desa dengan adanya defisit sebesar Rp. 255.080.385 kemudian ditutupi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 405.080.385. Dari data

yang ada bahwa anggaran pendapatan desa lebih sedikit dibandingkan jumlah belanja dan adanya defisit.

Khusus untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan desa sebesar Rp 1.471.395.800 yang bersumber dari PBK Kabupaten (Pendapatan Bantuan Keuangan), Dana Desa, dan BKK DAIS (Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan). Jadi untuk anggaran tersebut di gunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan berupa corblok *full* yang di kerjakan oleh masyarakat setempat (wawancara dengan Danarta, Lely Yulianti, Pada 7 tanggal 2025).

E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi

1. Pembagian Wilayah Administrasi

Kalurahan Triwidadi secara administrasi memiliki 22 pedukuhan yang terdiri dari 106 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 11, 8945 Ha. Pedukuhan di wilayah Kalurahan Triwidadi meliputi :

Tabel 2. 2
Data Pedukuhan dan Jumlah RT

No	Nama Pedukuhan	Jumlah RT
1.	Gowo	4 RT
2.	Jojoran Wetan	4 RT
3.	Jojoran Kulon	8 RT
4.	Nanggul	4 RT

5.	Kersan	4 RT
6.	Gampeng	4 RT
7.	Sabrang Lor	3 RT
8.	Sabrang Kidul	4 RT
9.	Pajangan	6 RT
10.	Blabak	3 RT
11.	Kadireso	8 RT
12.	Butuh Lor	4 RT
13.	Buruh Kidul	4 RT
14.	Polaman	4 RT
15.	Jogonandan	4 RT
16.	Ngincep	6 RT
17.	Kalisoko	6 RT
18.	Jambean	7 RT
19.	Kayuhan Wetan	4 RT
20.	Kayuhan Kulon	5 RT
21.	Palambongan	4 RT
22.	Trucuk	6 RT

Sumber : Hasil Penelitian Kalurahan Triwidadi 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pedukuhan yang ada di Kalurahan Triwidadi masing-masing memiliki jumlah RT yang kurang lebih sama jumlahnya. RT paling banyak adalah Pedukuhan Kadireso dan

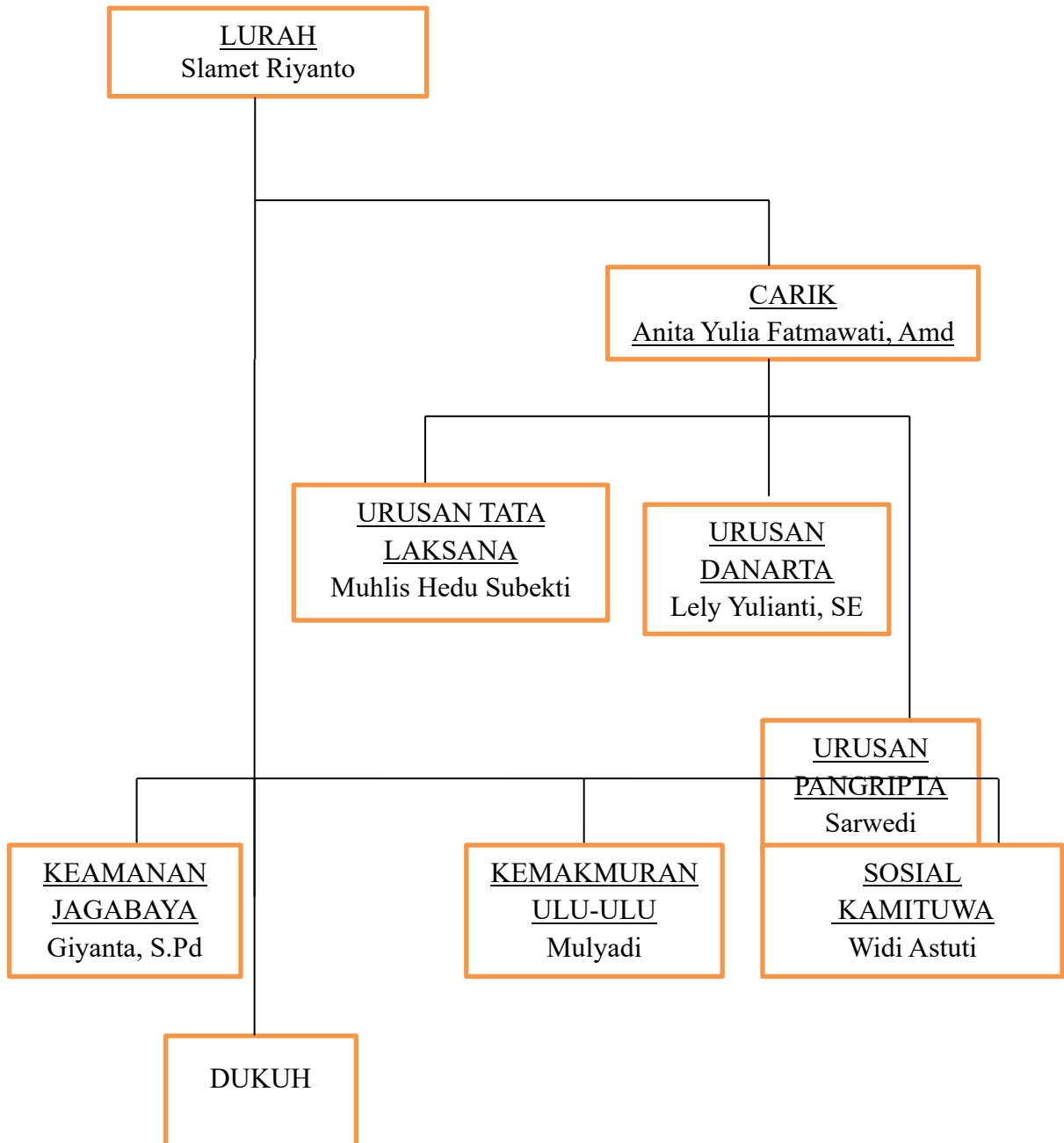
Pedukuhan Jojora Kulon sebanyak 8 RT dan Pedukuhan Sabrang Lor dan Pedukuhan Blabak paling sedikit yaitu 3 RT.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Triwidadi

Kalurahan Triwidadi merupakan Kalurahan yang memiliki struktur didalamnya, dimana ada Lurah, Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Dukuh yang dimana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat memberikan pelayanan yang baik serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi tergambar sebagai berikut :

Bagan 2. 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi



Tabel 2. 3
Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Triwidadi

1. Lurah	: Slamet Riyanto
2. Carik	: Anita Yulia Fatmawati, Amd
3. Kaur Tata Lakasana	: Muhlis Hedu Subekti
4. Kaur Danarta	: Lely Yulianti, SE
5. Kaur Pangripta	: Sarwedi
6. Kasi Kamituwa	: Widi Astuti
7. Kasi Ulu-ulu	: Mulyadi
8. Kasi Jagabaya	: Giyanta, S.Pd
9. Dukuh	
A. Guwo	: Mukiyo
B. Gampeng	: Waluyo
C. Jojoran Kulon	: Marjiman
D. Jojoran Wetan	: Tumiyo
E. Blabak	: Endung Dasuki
F. Kadireso	: Suyandi
G. Sabrang Lor	: Sapardi
H. Sabrang Kidul	: Pardi
I. Nanggul	: Wakimin
J. Kersan	: Giyono
K. Pajangan	: Budiyanto
L. Butuh Lor	: Warsiyo

M. Butuh Kidul	: Tri Handayani
N. Kayuhan Kolon	: Sudadi
O. Kayuhan Wetan	: Wajiyono
P. Polaman	: Saturjan, Amd
Q. Jambean	: Hendi
R. Ngincep	: Subiyana
S. Jagonanda	: Saronto
T. Kalisoko	: Siyem
U. Plambongan	: Sarwedi
V. Trucuk	: Dwi Janar

Sumber: Hasil Penelitian Kalurahan Triwidadi 2025

Dari struktur oraganisasi pemerintahan diatas dapat kita simpulkan bahwa Kalurahan Triwidadi memiliki susunan yang terstruktur, dan dimana memiliki posisi dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu : posisi pertama adalah lurah, dan lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan di bantu oleh pamong-pamong yang ada, dan pamong-pamong memiliki tanggung jawab yang berbeda seperti sekretaris Kalurahan dipimpin oleh Carik dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) Tata Laksana, Kaur Danarta, Kaur Pangripta, yang masing-masing dipimpin oleh kepala kaur yang ada. Dalam pelaksanaan teknis yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan masing-masing akan dipimpin oleh Kepala Seksi dan mengenai pelaksana kewilayahan akan dipimpin oleh Dukuh.

BAB III

ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KALURAHAN TRIWIDADI

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha untuk menguraikan hasil yang sudah diteliti dalam bab ini. Didalam melakukan penelitian data yang ada diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan adanya 11 informan, dan membahas berkaitan dengan strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi. Berikut peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan melalui informan maupun temuan langsung dilapangan.

A. Penetapan Lingkungan, dan Batasan Waktu Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan tentunya diperlukan sasaran atau lingkungan sebagai lokasi yang akan dilakukan pembangunan jalan, dengan batasan dalam pengerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan pelaksana pengerjaan jalan supaya dalam proses pelaksanaan dapat diketahui seberapa pengerjaan jalan dapat diselesaikan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang sudah ditetapkan lingkungan titik jalan yang akan dibangun melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud penentuan titik-titik lokasi pembangunan jalan yang urgen dibangun menjadi kebutuhan mendesak dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

yang masuk di lingkungan padukuhan. Untuk lingkungan yang masuk dalam pembangunan infrastruktur jalan terdiri dari 10 Padukuhan dari dana desa, kemudia dari PBK Kabupaten (Pendapatan bantuan keungan) 9 padukuhan, dan BKK Dais (Bantuan keuangan khusus dana keistimewaan) 3 padukuhan. Setiap penetapan lokasi titik-titik pembangunan infrastruktur jalan di Triwidadi sudah masuk dalam perencanaan dan anggaran, dari penetapan lingkungan pembangunan jalan sudah menyesuaikan dengan anggaran bahwasannya untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bersumber dari dana desa saja melaikan ada dari dana PBK Kabupaten, dan BKK Dais.

Dari pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun juga sudah ditetapkan batasan waktu dalam pengerjaan jalan, untuk mengetahui hal diatas maka dilakukan wawancara dengan Mulyadi sebagai Ulu-ulu (bidang pembangunan dan kemakmuran), berikut hasil wawancara :

“Dari awal perencanaan atau musrembang untuk waktu dalam pengerjaan pembangunan jalan sudah ditetapkan dalam waktu satu tahun yang biasanya dimulai dari maret dan sampai oktober yang dimana dibulan januari dan february untuk siklus perencanaan desa dan akhir tahun november dan desember digunakan untuk khusus membuat laporan akhir tahun LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan), rata-rata sampai saat ini pelaksanaan pembangunan jalan untuk jangka waktu terlaksana sesuai target yaitu satu tahun sesuai dengan APBDes. Dan pembangunan jalan dilaksanakan dalam satu tahunnya dengan target 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan” (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dari pemerintah desa sudah mengatur batasan waktu selama 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan atau sesuai jangka waktu target pelaksanaan dalam satu tahun perencanaan yang sudah ditetapkan yaitu dalam pengerjaan jalan dari

maret sampai oktober dan untuk awal bulan januari dan februari untuk siklus perencanaan desa kemudia akhir tahun di bulan november dan desember digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan), penentuan batasan waktu dalam pengerjaan pembangunan jalan dapat menjadi tolak ukur supaya berjalannya proses pembangunan jalan efektif dan efesian.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa lebar, panjang dan tebal volume jalan serta jenis jalan yang dibangun maka dilakukan wawancara dengan Endung Dasuki selaku tim pelaksana pembangunan jalan, berikut hasil wawancara :

“Volume tebal jalan 12 cm untuk kondisi yang khusus sulit lagi biasanya lebih tebal beberapa cm bisa mencapai 15 cm karena berdasakan kedaan tanah, ada tanah yang tingkat keretakannya beda karena di situ ada mata air. kemudia untuk lebar jalan 2,5 meter dan panjang jalan sekitar 80 meter, dan 100-150, ada juga 200-300 meter, rata-rata itu sudah corblok full” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025).

Gambar 3. 2
Jalan Cor Blok



Sumber : Data Peneliti, 2025

Dari hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa volume tebal jalan 12 cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan jalan, kemudian pada perencanaan sudah di tetapkan mengenai lebar dan panjang jalan yaitu lebar jalan yang dibangun 2,5 meter cm dengan panjang 80 meter, 100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan yang

di bangun. Dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan dengan menentukan ketebalan, lebar, panjang jalan dan jenis jalan yang di bangun corblok *full* atau semen sudah di atur pemerintah desa agar proses dalam pembangunan infrastruktur jalan terlaksana dengan terstruktur dan selesai tepat waktu.

Pembangunan infrastruktur jalan adalah jalan perkampungan yang masuk dalam lingkungan padukuhan yang artinya juga dalam wilayah masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur jalan yang masuk diwilayah lingkungan warga maka dilakukan wawancara dengan Abdul Rohman selaku ketua LPMK (Lembaga Pembangunan Masyarakat Kalurahan), berikut hasil wawancara :

“Ya pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun adalah jalan padukuhan atau jalan lingkungan warga yang sebagian jalan saat di survei sebelum melaksanakan pembangunan ada yang terkena perkarangan lahan warga ketika pembangunan jalan sudah mentok ada tanaman seperti pohon kelapa dan lainnya di lahan warga dan tidak ada alternatif lain selain melintasi perkarangan lahan warga tersebut untuk bangun jalan tapi tidak semua cuma ada beberapa saja dan ada yang tidak setuju memberikan lahannya juga beberapa orang saja”(Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Triwidadi khususnya dalam padukuhan yang masuk wilayah masyarakat, sebelum dibangun jalan pemerintah desa sudah mengatur melalui tim pelaksana pembangunan jalan agar jalan yang di bangun harus di survei terlebih dahulu dan di patok agar mengetahui adanya terkena perkarangan rumah warga dalam pembangunan jalan dan ditemukan adanya beberapa yang tidak setuju dibangun jalan hal itu terjadi karena dari kondisi

lingkungan lahan adanya tanaman warga salah satunya pohon kelapa yang dapat dikonsumsi buahnya dan bisa menjadi sumber pendapatan dan hanya sebagian saja.

Dari pernyataan hasil wawancara dengan Mulyadi selaku kasi ulu-ulu (bidang pembangunan dan kemakmuran), Endung Dasuki selaku tim pelaksana pembangunan jalan, Irwan selaku staff Kalurahan Triwidadi serta koordinator pelaksana bidang pembangunan, dan Abdul Rohman selaku ketua LPMK (Lembaga pembangunan masyarakat kalurahan) dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah desa sudah menetapkan lingkungan titik jalan yang dibangun melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud penentuan titik-titik lokasi pembangunan jalan yang urgen dibangun menjadi kebutuhan mendesak dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Pembangunan infrastruktur jalan yang juga sudah ditetapkan batasan waktu selama 1-2 minggu per titik pembangunan jalan atau sesuai jangka waktu target pelaksanaan dalam satu tahun yang sudah ditetapkan dalam pengerjaan jalan dari maret sampai oktober dan untuk awal bulan januari dan februari untuk siklus perencanaan desa kemudian akhir tahun di bulan november dan desember digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan), kemudian volume, tebal jalan 12 cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan jalan, selanjutnya pada perencanaan sudah ditetapkan mengenai lebar dan panjang jalan yaitu lebar jalan yang dibangun 2,5 meter cm dengan panjang 80 meter, 100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan yang di

bagun. Kemudian jenis jalan yang di bagun adalah corblok *full*. Jalan yang dibagun sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu untuk memastikan jalan masuk dalam patokan, namun ditemukan dalam penetapan lingkungan jalan yang dibagun adanya lahan warga yang terkena dalam pembangunan jalan bahwasannya ada yang setuju jalan tetap dibagun dan ada juga yang tidak setuju karena adanya tanaman dalam lahan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan dalam penetapan lingkungan, dan batasan waktu dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi, pemerintah kalurahan Triwidadi dalam mengatur penetapan lingkungan jalan yang dibagun dan batasan waktu dalam pengerjaan jalan sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan baik di karenakan dalam penentuan lokasi lingkungan pembangunan jalan mengutamakan lokasi yang urgen atau perlu diperbaiki segera melalui perencanaan dengan di lakukannya musrembang, juga selain itu sebelum jalan di bagun adanya survei yang dilakukan oleh tim pelaksana pembangunan jalan dari kalurahan serta waktu pengerjaan pembangunan jalan di kerjakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada perencanaan yang sudah ditetapkan.

B. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu kalurahan atau desa, menjadi salah satu tugas dan peran dari pemerintah desa yang dimana terdapat didalamnya tindakan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berpihak pada masyarakat.

Pembangunan jalan desa dapat mendukung mobilitas warga yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat seperti meningkatkan akses ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, dan keamanan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa harus pintar dalam mencari sumber dana baik dari APBDes, bantuan pemerintah kabupaten atau pusat maupun kerjasama dengan sektor swasta, pemerintah desa harus dekat dengan masyarakat menjalin komunikasi, dan melayani warganya, pemerintah desa juga harus melindungi dampak dari pembangunan jalan seperti perkarangan lahan warga yang masuk rute pembangunan jalan berstatus hak milik pribadi, dan monitoring secara berkala perlu dilaksanakan seperti terdapatnya titik pembangunan jalan yang sulit dikerjakan, untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur jalan.

Untuk mengetahui bersumber dari mana anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, maka dilakukan wawancara dengan Anita Yulia selaku Carik, berikut hasil wawancara :

“Pembangunan infrastruktur jalan Kalurahan Triwidadi termasuk dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa, PBK Kabupaten dan provinsi BKK Dais. Dari pemerintah Kalurahan yang dapat diakses adalah dana desa untuk bidang Pembangunan khususnya infrastruktur jalan itu Rp 316.394.000 juta karena kebutuhan bidang lainya masih banyak jadi untuk pembagunan jalan tidak bisa semua pakai dana desa dan untuk PBK Kabupaten dan BKK Dais itu dari dana aspirasi dewan tingkat 1 dan tingkat 2. total anggaran yang ada khususnya untuk bidang pembangunan infrastruktur jalan corblok *full* di tahun 2024 total Rp 1.471.395.800

Gambar 3.3
APBKal 2024



Sumber : triwidadi.bantulkab.go.id, 2024

miliar, sumber dana dari dana desa Rp 316.394.900, dari PBK Kabupaten Rp 980.000.900 dan dari BKK Dais Rp 175.000.000 ini” (wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Anita Yulia selaku Carik dapat dipahami bahwa dana untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 316.394.000 juta, PBK kabupaten sebesar Rp 980.000.900, dan dari provinsi BKK Dais sebesar Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendanaan diatas berjumlah Rp 1.471.395.800 miliar. Menurut peneliti anggaran yang didapat oleh pemerintah desa Triwidadi untuk pembangunan infrastruktur jalan tidaklah sedikit, pemerintah desa dalam hal ini yang mengurus dan melayani warganya dengan menyediakan akses jalan yang layak untuk warganya, maka perlu dilakukank perencanaan yang baik guna pembangunan dapat dilakukan secara merata di semua padukuhan.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah desa Triwidadi untuk mendapatkan dana dari luar untuk pembangunan infrastruktur jalan maka peneliti melakukan wawancara dengan Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi, berikut hasil wawancara:

“Dana aspirasi yang masuk untuk pembangunan jalan dari PBK Kabupaten dan BKK Dais, adalah melalui dewan yang terpilih secara khusus yang memegang wilayah Triwidadi dan ada tim suksesnya, dewan yang terpilih ini melakukan reses dan warga menyampaikan kebutuhannya yaitu meminta untuk di bagun jalan salah satunya. sebagai pemerintah desa tidak bisa mengambil keputusan dalam reses

karena tidak punya wewenang meskipun dapat ikut serta tetap tidak boleh menyapaikan kelu kesa, pemerintah desa hanya dapat memfasilitasi pertemuan antara dewan dengan masyarakat untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan, dan diketahui oleh sebagai lurah. Caranya sebelum agenda reses dilaksanakan di Kalurahan Triwidadi pemerintah desa membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, Dukuh, POKGIAT, dan LPMK dan seksi bidang pembangunan jalan maupun masyarakat, dalam pertemuan pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang pembangunan jalan, sosialisasi bertujuan mendorong masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan, membangun saluran komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan memberikan masukan kebijakan pembangunan jalan seperti serangkaian panduan supaya dapat membantu membuka pikiran masyarakat. Selain itu ada pembuatan proposal setelah melalui reses dan pembuatan proposal dibuat oleh masyarakat dan dibantu oleh pemerintah desa” (wawancara pada tanggal 10 Februari 2025).

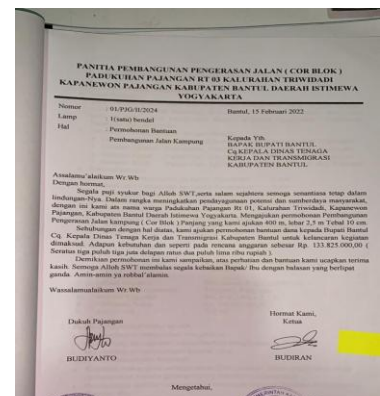
Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa telah melayani tindakan untuk mendapatkan dana dari luar dengan melibatkan warga melalui reses dewan secara khusus yang memegang Triwidadi, dimana masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk dibangun jalan kemudian pemerintah desa yang tidak berhak untuk ikut peran dalam menyampaikan aspirasi maka dari itu sebelum terselenggaranya kegiatan reses, pemerintah desa bertindak yaitu membuat pertemuan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan dorongan tentang kebutuhan di pembangunan infrastruktur jalan agar masyarakat terarah dalam menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan infrastruktur jalan dan pembuatan proposal untuk mendapatkan dana dibantu oleh pemerintah desa.

Hal senada disampaikan oleh Sarjun selaku masyarakat kalurahan

Triwidadi, berikut hasil wawancara :

“Pemerintah desa mewadahi pembuatan proposal, yang membuat proposal adalah masyarakat seperti atas nama padukuhan A Kalurahan Triwidadi. Pemerintah desa telah membantu dalam memfasilitasi komputer, printer dan jasa, karena banyaknya masyarakat seperti orang tua belum mahir menggunakan teknologi komputer bahkan dukuh-dukuh juga ada yang tidak bisa, jadi dikomunikasikan dan perwakilan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa membuat proposal di kantor Kaluraha kemudian pemerintah desa melakukan pengecekan ulang proposal lalu di tanda tangani pak Lurah, setelah semua proposal siap masyarakat naikan ke Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY untuk mendapatkan dana yang ada ini”(wawancara pada 10 Februari 2025).

Gambar 3. 4
Proposal Permohonan
Pembuatan Jalan
Pedukuhan



Sumber : Data Peneliti, 2025

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa telah melayani warga dengan memfasilitasi pembuatan proposal. Dalam proses tersebut adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mendapatkan dana dari luar, pemerintah desa juga berusaha melayani dengan memfasilitasi warga dalam pembuatan proposal yang akan di ajukan untuk mendapatkan dana pembangunan infrastruktur jalan, walaupun dengan keterbatasan masyarakat tantang pembuatan proposal dan menggunakan komputer, pemerintah desa tetap membantu dengan melayani warga melalui kemampuan yang dimiliki serta menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam pembuatan proposal dan bahwasanya proposal tersebut dibuat bersama-sama

dengan masyarakat dan atas nama Padukuhan di Kalurahan Triwidadi kemudian di ketahui oleh Lurah dalam bentuk legalitas lalu diberikan ke Kabupaten dan Provinsi, alhasil memperoleh dana bantuan yang ada dari PBK Kabupaten dan BKK Dais untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Selanjutnya untuk mengahui bagaimana penggunaan anggaran yang ada untuk Pembangunan Infrastruktur jalan maka peneliti melakukan wawancara dengan Mulyadi selaku ulu-ulu (kasih pembangunan dan kemakmuran), berikut hasil wawancara :

“Rata-rata sekarang dianggarkan dan langsung di belanjakan dalam bentuk fisik khususnya matrial itu berupa semen, pasir dan batu split, kalau dari Dana Desa sendiri Rp 316.394.900, dari dana PBK Kabupaten Rp 980.000.900, dan dari dana BKK DAIS 175.000.000 dari ketiga anggaran yang ada ini dicarikan lalu dibelanjakan oleh pemerintah ada pj yang bertanggungjawab untuk itu dan untuk 10% dari setiap anggaran di alokasi kan ke HOK upah tenaga kerja yang di transfer langsung ke warga yang sebagai koodinator nya nanti HOK ini di kelola warga gak pemerintah desa lagi yang kelola kami kasih kewenangan untuk warga meskipun istilahnya HOK maupu matrial di berikan langsung ke setiap padukuhan yang masuk dalam pembangunan jalan nanti masyarakat yang kelola dan dengan cara gotong royong tetap ada tim pelaksana nya juga yang di bentuk dari kalurahan sebagai monitoring”. (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 316.394.900 , Dana Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK) sebesar Rp 980.000.900 dan Dana Bantuan Kuangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (BKK Dais) 175.000.000, dari dana yang ada tidak di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melaikan sudah dalam bentuk fisik matrial

sebagai bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja yang kemudia matrial diberikan ke masyarakat yang mengerjakan berdasarkan setiap Padukuhan yang termasuk dalam titik pembangunan infrastruktur jalan dan HOK upah tenaga kerja ditranfer ke bank salah satu warga yang sebagai perwakilan atau koodinator dalam Padukuhan tersebut dibidang pembangunan jalan dan sudah didalam pengawasan atau pemantau pemerintah desa langsung melalui tim pelaksanaan yang dibentuk.

Hal Senada disampaikan oleh Sarwedi selaku kasih perencanaan, berikut hasil wawancara :

“Untuk HOK upah tenaga untuk pembagunan jalan dari dana desa Rp 16.394.900, PBK Kabupaten Rp 80.000.900 dan BKK DAIS Rp 25.000.000 ini sudah 10% include dari total anggaran yang ada, jadi semakin besar volume jalan yang dibagun maka besar juga HOKnya”. (wawancara pada tanggal 7 Februari 2025)

Gambar 3. 5
HOK Upah Tenaga kerja

16.00 HOK	90,000.00
57.00 HOK	80,000.00

Sumber : Data Peneliti, 2025

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk HOK upah tenaga kerja yang bersumber dari DD sebesar 16.394.900, PBK Kabupaten sebesar 80.000.900 dan BKK DAIS sebesar 25.000.000 dana tersebut sudah termasuk dalam 10 % total anggaran yang tersedia, selain itu juga semakin

besar volume jalan yang akan dikerjakan semakin besar pula HOK yang diberikan.

Hal senada disampaikan oleh Abdul Azis selaku masyarakat, berikut hasil wawancara:

“Ya jadi HOK upah tenaga kerja yang kelola masyarakat dan rata-rata kegunaannya bukan untuk HOK upah kerja tetapi untuk kepentingan bersama di bidang pembangunan jalan, seperti HOK digunakan untuk sewa bego khusus untuk buka jalan yang diperbukitan, juga sewa alat seperti molen, dan juga tetap pakai tukang 2-3 orang dari luar masyarakat Triwdadi yang memang profesional dalam mengecor untuk mengantisipasi cornya agar baik hasilnya dan tetap bersama dengan masyarakat yang mengerjakan kemudia HOK sudah jadi kewenangan masyarakat perpadukuhan jadi masing-masing padukuhan yang mengaturnya yang penting tidak keluar dari kegunaan untuk pembangunan jalan, juga akan dibuat laporan akhir dari dana HOK yang sudah digunakan setelah jalan sudah selesai dikerjakan semua”. (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa untuk penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi, diantaranya untuk HOK upah tenaga kerja yang dikelola oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dana HOK upah tenaga kerja yang dikelola oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan bersama diantaranya untuk menyewa alat-alat seperti bego yang digunakan untuk membuka jalan di daerah perbukitan, molen, serta mempekerjakan tukang 2-3 orang yang berpengalaman dari luar masyarakat kalurahan triwidadi.

Dari pernyataan hasil wawancara dengan Anita Yulia selaku Carik, Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi, Sarjun selaku masyarakat, Mulyadi selaku kasi ulu-ulu (bidang pembangunan dan kemakmuran), Sarwedi selaku pangripta, dan Abdul Azis selaku masyarakat dapat peneliti pahami bahwa

penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 316.394.900 , Dana Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK) sebesar Rp 980.000.900 dan Dana Bantuan Kuangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (BKK DAIS) 175.000.000, untuk mendapatkan dana dari luar yang ada dari PBK dan BKK Dais pemerintah desa bertindak yaitu membuat pertemuan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan dorongan tentang kebutuhan di pembangunan infrastruktur jalan agar masyarakat terarah dalam menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan infrastruktur jalan serta pembuatan proposal untuk mendapatkan dana dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah desa, kemudian dari dana yang ada tidak di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melainkan sudah dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja yang kemudia matrial diberikan ke masyarakat yang mengerjakan berdasarkan setiap Padukuhan yang termasuk dalam titik pembangunan infrastruktur jalan dan HOK ditranfer ke bank salah satu warga yang sebagai perwakilan atau koodinator dalam Padukuhan tersebut dibidang pembangunan jalan. Untuk HOK upah tenaga kerja yang bersumber dari DD sebesar 16.394.900, PBK Kabupaten sebesar 80.000.900 dan BKK DAIS sebesar 25.000.000. Dana HOK upah tenaga kerja yang dikelola oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan bersama diantaranya untuk menyewa alat-alat seperti bego yang digunakan

untuk membuka jalan di daerah perbukitan, molen, serta mempekerjakan tukang 2-3 orang yang berpengalaman dari luar masyarakat Kalurahan Triwidadi

Selanjutnya dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di Kalurahan Trwidadi, terdapat adanya masalah pada saat proses survei jalan Padukuhan yang masuk dalam perkaragan warga bahwasannya terdapat adanya masyarakat yang tidak setuju jalan dibagun dalam perkaragan wilayahnya atas dasar status jalan milik pribadi.

Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah desa untuk penyelesaian masalah Pembangunan Infrastruktur Jalan yang mengenai perakaragan warga atau lahan milik warga, maka peneliti melakukan wawancara dengan Endung Dasuki selaku Tim Pelaksana Pembangunan Jalan, berikut hasil wawancara :

“Tim pelaksanan kegiatan mensurvei kondisi jalan yang dibagun terlebih dahulu untuk memastikan apakah jalan aman atau tidak dan ketikan pemasangan patokan kami menemukan ada perkaragan atau halaman warga yang terkena pembangunan jalan, yang menjadi masalahnya adanya warga tidak rela tanah nya di pakai karena adanya tamanan seperti pohon kelapa yang dapat dikosumsi dan bisa dijual dan ada tanaman lainnya juga sebagai alasan dan di perkuat lagi dengan adanya sartifikat hak milik atau SHM lahan, tidak banyak beberapa saja kasus serupa ditemukan karena 90% warga setuju dan antusia jalan dibagun dalam wilayah padukuhan mereka, dan untuk penyelesaiannya dimusyawarakan atau dirembuk dengan masyarakat yang bersangkutan bersamaan pak dukuh, RT setempat, tokoh masyarakat, oleh pemerintah desa”. (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa pemerintah desa berupaya melindungi warga atas pembangunan jalan yang terkena perkaragan yang tidak setuju lahannya dipakai untuk dibagun jalan karena

adanya tanaman yang dapat dimanfaatkan warga dan adanya sertifikat hak milik SHM lahan warga tersebut sehingga penyelesaiannya harus diproses dengan serius melalui pertemuan musyawarah dengan warga yang bersangkutan dan tokoh masyarakat sebelum dilakukannya pembangunan jalan, walaupun 90 % warga tidak mempermasalahkan pembangunan jalan di padukuhan mereka.

Hal senada disampaikan oleh Winarni selaku masyarakat Triwidadi, berikut hasil wawancara :

“Jalan yang dibangun dalam padukuhan kami di Jambean saya sendiri salah satu orang yang halaman didepan rumah saya terkena dalam patokan pembangunan jalan dan halaman saya isinya tanaman, meskipun sebenarnya tidak banyak sekitar 5-10 meter yang terkena dalam patokan, karena saya juga punya SHM jadi saya sampaikan ke tim pembangunan sebagai bahan untuk mempertahankan lahan. Sekitar satu bulan pembangunan tersendat karena hal tersebut, dan pemerintah desa bapak ulu-ulu dan rekan silaturahmi ke rumah mereka terus sampaikan bahwa pentingnya pembangunan jalan, akhirnya ketika di rembuk bersama-sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat berserta masyarkat saya luluh karena melihat banyaknya warga Jambean yang memohon untuk jalan tetap dibangun, kembali lagi melihat kondisi bahwa jalan yang akan dibangun harus melewati perkarangan rumah saya karena tidak ada alternatif lain untuk penghubung jalan lainnya. Setelah diproses, melalui notaris dan dibantu pemerintah desa, mapun masalah serupa penyelesaiannya melalu proses seperti ini” (wawancara pada tanggal 13 Februari 2025).”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa berupaya melindungi dan melayani warga dalam menyelesaikan permasalahan lahan yang terkena pembangunan infrastruktur jalan bahwasannya pada pembangunan jalan yang dilakukan terdapat sebagian perkarangan lahan warga yang masuk dalam patokan yang dimana berkaitan dengan adanya tanaman warga sebagai alasan untuk tidak memberikan lahan tersebut dan di

perkuat dengan sertifikat hak milik (SHM), kemudian melihat dari kondisi jalan yang dibangun sudah mentok dan harus melewati lahan tersebut. Dengan adanya tindakan pemerintah desa melalui kunjungan langsung ke rumah warga yang bersangkutan untuk melakukan komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum masyarakat, pada akhirnya warga sepakat pembangunan jalan dilanjutkan dan pemerintah desa juga telah membantu warga dalam proses pembuatan surat kerelahan lahan yang absah melalui notaris.

Adanya pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di Kalurahan Triwidadi merupakan pembangunan yang berfokus pada jalan Padukuhan, yang dimana sudah ditentukan pemerintah desa dalam perencanaan melalui musrembang. Namun ada Padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah desa terhadap Padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan, maka dilakukan wawancara dengan Mulyadi selaku ulu-ulu, berikut hasil wawancara :

“Pembangunan infrastruktur jalan yang belum dibangun di beberapa padukuhan, karena adanya skala prioritas penggunaan dana desa dan harus dibagi semua setiap bidang seperti kesehatan dll, padukuhan yang tidak dapat pembangunan sekarang nanti dapatnya di tahun depannya.” (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti pahami bahwa permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas pembangunan

diutamakan di daerah padukuhan yang jalanya rusak berat ataupun ada pembukaan jalan baru di padukuhan kemudian dianggarkan dari dana desa. Dana desa juga di bagi lagi untuk bidang-bidang lain, seperti kesehatan dll. Selanjutnya untuk padukuhan yang belum mendapatkan jatah pembangunan jalan akan dianggarkan untuk dilakukan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Hal berbeda dikatakan oleh Abdul Azis selaku masyarakat Triwidadi, berikut hasil wawancara :

“Dusun Jogonandan tidak perna dapat pembangunan infrastruktur jalan sampai saat ini padahal sering kami sampaikan dalam musrembang, pembangunan jalan mandiri di lakukan dari iuran warga untuk beli matrial, anggaran dana desa ada tapi bukan untuk bidang jalan di Jogonandan melainkan untuk bidang kesehatan yaitu posyandu seperti penambahan timbangan balita dan komputer, kalau komputer di posyandu tidak terlalu dibutuhkan sementara jalan kebutuhan umum seluruh warga bisa mengaksesnya untuk kepentingan bersama tapi Kalurahan tidak memberikan padahal jalan sudah tidak layak, kasihnnya sama yang dekat dengan

Gambar 3. 6
Jalan Padukuhan Jogonandan



Sumber : Data Peneliti, 2025

pemerintah desanya yang punya hubungan dengan padukuhan tersebut, baik dari dana aspirasi PBK Kabupaten dan BKK Dais Dusun Jogonandan tidak perna mendapatkan pembangunan jalan tetapi tidak dipersalahkan karena bukan rana kami” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa adanya tindakan pemerintah desa yang kurang optimal melayani dan melindungi dalam memelihara atau memperbaiki jalan yang sudah tidak layak, yang seharusnya pembangunan jalan ini dilakukan untuk keselamatan dan kenyamanan warga.

Padukuhan Jagonandan yang tidak mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan memilih untuk membangun jalan secara mandiri karena sudah disampaikan dalam musrembang tetap tidak mendapatkan pembangunan jalan dari Kalurahan, sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya Padukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa hanya memperhatikan sarana prasarana untuk bidang kesehatan dalam Padukuhan Jagonandan yang sebenarnya menurut masyarakat yang sangat menjadi kebutuhan utama adalah di pembangunan infrastruktur jalan. Berbeda dengan dana dari PBK Kabupaten dan BKK Dais untuk pembangunan jalan yang tidak kebagian di Padukuhan Jagonandan masyarakat merasa tidak masalah karena bukan dalam jangkaun terdekat mereka dan kabupaten maupun provinsi membawa satu daerah dan pembangunan jalan berdasarkan sekla prioritas.

Hal senada disampaikan oleh Anom selaku masyarakat kalurahan triwidadi, berikut hasil wawancara :

“Tidak semua padukuhan dapat pembangunan infrastruktur jalan sekarang masih ada tiga padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan jalan yaitu Jagonandan, Trucuk, dan Sebarang Kidul yang seharusnya diperhatikan oleh Kalurahan dan masyarakat sudah sampaikan berulang kali untuk kebutuhan dibidang jalan, isitilah kasarnya iri karena taunya Padukuhan Jambean jalannya dibagun sementara padukuhan Jagonandan jalannya tidak dibagun baik Padukuhan Sebrang Kidul dan Trucuk pembangunan jalannya lama tapi padukuhan lain cepat” (wawancara pada tanggal 13 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa Triwidadi belum merata melayani dalam menaggapi permintaan masyarakat

terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan masyarakat menilai adanya perbedaan tindakan dari pemerintah desa antara Padukuhan bahwasannya terdapat tiga Padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan seperti Padukuhan Jagonandan yang bahkan sama sekali tidak pernah mendapatkan pembangunan jalan dari pemerintah desa baik Padukuhan Trucuk dan Sebrang Kidul warga menilai proses pembangunan jalannya lamban atau lama terlaksana dalam padukuhan tersebut sedangkan Padukuhan lainnya pembangunan jalan terlaksana cepat.

Dari hasil wawancara dengan Mulyadi selaku ulu-ulu, Abdul Aziz selaku masyarakat, Anom selaku masyarakat dapat peneliti pahami bahwa permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalannya rusak berat. sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya Padukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa hanya memperhatikan sarana prasarana untuk bidang kesehatan dalam Padukuhan Jagonandan yang sebenarnya menurut masyarakat yang sangat menjadi kebutuhan utama adalah di pembangunan infrastruktur jalan

Dari pernyataan hasil wawancara dengan berbagai informan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah desa dalam pembanguann

infrastruktur jalan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 316.394.000 juta, PBK kabupaten sebesar Rp 980.000.900, dan provinsi BKK Dais sebesar Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendanaan diatas berjumlah Rp 1.471.395.800 miliar. Selanjutnya untuk mendapatkan dana dari luar pemerintah melibatkan warga untuk menambah anggaran dari dana desa khususnya untuk bidang pembangunan jalan dan melalui reses dewan secara khusus yang memegang Triwidadi, dimana masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk dibangun jalan. Penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 316.394.900 , Dana Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK) sebesar Rp 980.000.900 dan Dana Bantuan Keuangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (BKK Dais) 175.000.000, dari dana yang ada tidak diberikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melainkan sudah dalam bentuk fisik material sebagai bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja. Pemerintah desa berupaya melindungi dan melayani warga dalam menyelesaikan permasalahan lahan yang terkena pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum masyarakat, pada akhirnya warga sepakat pembangunan jalan dilanjutkan dan pemerintah desa juga telah membantu warga dalam proses pembuatan surat kerelaan lahan

yang absah melalui notaris. permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalannya rusak berat. sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya Padukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. Dari pernyataan diatas berkaitan dengan Padukuhan yang tidak mendapatkan pembangunan jalan yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama karena jalan sudah tidak layak dan perlu dibangun atau diperbaiki demi keselamatan dan keyamanan warga, juga adanya ketidakadilan antara Padukuhan bahwa adanya 3 Padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan dari 22 padukuhan yang ada di Kalurahan Triwidadi, bahwasannya adanya tindakan pemerintah desa yang kurang optimal.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi pemerintah desa sudah berupaya dalam melayani dan melindungi masyarakat, tetapi masih ada deskriminasi dari pemerintah desa bawah terhadap padukkuhan-padukuhan tertentu dalam pembangunan infrastruktur jalan.

C. Sumber Daya Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan sumber daya tanpa sumber daya suatu pembangunan jalan tidak dapat dilakukan, sumber daya

yang dimaksud seperti sumber daya manusia, material dan alat, kedua sumber daya ini merupakan faktor penting dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan adanya sumber daya tersebut maka pembangunan infrastruktur jalan dapat terlaksana.

1. Sumber daya manusia

Untuk mengetahui SDM berupa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan maka dilakukan wawancara dengan Abdul Rohman selaku Ketua LPMK (Lembaga Pembangunan Masyarakat Kalurahan). Berikut hasil wawancara :

“Pembangunan jalan dikerjakan dengan gotong royong masyarakat, gotong royong sudah menjadi asas budaya masyarakat Triwidadi dan tergantung kebijakan padukuhan masing-masing, seperti ketika ada masyarakat yang tidak ikut membantu mengerjakan pembangunan jalan karena kesibukkan pribadi akan digantikan dengan menyediakan konsumsi untuk para pekerja atau didenda dalam bentuk uang dan kegunaannya untuk kebutuhan konsumsi, jadi kalau tidak ikut gotong royong akan mendapatkan sanksi sosial (wawancara pada tanggal 5 Februari 2025).

Gambar 3. 7
Gotong Royong Masyarakat
Dalam Pembangunan Jalan



Sumber : triwidadi.bantulkab.go.id,
2025

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam pembangunan jalan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, gotong royong sendiri sudah menjadi tradisi masyarakat Triwidadi. Namun untuk pengerjaan oleh masyarakat tergantung terhadap kebijakan setiap Padukuhan masing-masing. Untuk gotong royong sendiri jika ada masyarakat yang tidak

ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan karena ada kesibukan maka digantikan dengan menyediakan konsumsi bagi para masyarakat yang mengerjakan pembangunan jalan, jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan sanksi sosial.

Gotong royong masyarakat Triwidadi dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai bentuk tenaga kerja. Masyarakat Kalurahan Triwidadi sendiri telah menanam dan menerapkan gotong royong sebagai dasar budaya yang identik dengan masyarakat Triwidadi, dalam kondisi apapun setiap masyarakat dituntut harus berpartisipasi apa lagi untuk kepentingan bersama. Selain itu juga mencerminkan nilai moral yang tinggi dan positif seperti kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong dan kepedulian.

Hal ini senada disampaikan oleh Endung Dasuki selaku tim pelaksana Pembangunan Infrastruktur Jalan, berikut hasil wawancara :

“Pembangunan jalan masih gotong royong murni dari dulu sampai sekarang, partisipasi masyarakat masih tinggi karena masyarakat sangat antusias ketika pembangunan jalan dilakukan di dalam Padukuhan mereka melalui anggaran yang sudah tersedia, masyarakat tinggal mengerjakan sesuai perencanaan dan arahan dari tim pelaksana pembangunan” (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025).

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pembangunan jalan di Kalurahan Triwidadi masih dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dari dulu sampai dengan sekarang. Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pembangunan infrastruktur jalan di padukuhan, karena anggaran

sudah disediakan oleh pemerintah, masyarakat tinggal mengerjakan, sesuai dengan perencanaan dan petunjuk dari tim pelaksana pembangunan.

Hal senada disampaikan oleh Slamet Riyanto selaku Lurah Triwidadi.

Berikut hasil wawancara :

“Untuk pembangunan jalan dikerjakan oleh masyarakat di setiap padukuhan yang mendapatkan jatah Pembangunan jalan melalui gotong royong, walaupun dilakukan dengan gotong royong tetap dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan tim Pembangunan infrastruktur jalan, sehingga kualitas jalan tetap terjaga”(Wawancara pada tanggal 10 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, pembangunan jalan dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong di setiap padukuhan yang mendapatkan jatah pembangunan, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh tim pembangunan jalan dan pemerintah desa supaya waktu pengerjaan dan kualitas jalan tetap terjaga.

Dari hasil wawancara dan dengan Abdul Rohman selaku ketua LPMK, Endung Dasuki selaku tim pelaksana pembangunan infrastruktur jalan, Slamet Riyanto selaku lurah Triwidadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong dalam pembangunan jalan. Masyarakat Kalurahan Triwidadi sendiri telah menanam dan menerapkan gotong royong sebagai dasar budaya yang identik dengan masyarakat. Pembangunan jalan dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong di setiap padukuhan yang mendapatkan jatah pembangunan, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap

berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh tim pembangunan jalan dan pemerintah desa. Pendapat peneliti pelaksanaan pengerjaan jalan yang melibatkan masyarakat melalui gotong royong merupakan salah satu peran pemerintah desa untuk mengatur penggunaan anggaran yang ada untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga ekonomi di desa dapat berputar di wilayah desa tersebut.

2. Sumber Daya Material Dan Alat

Kemudian dalam pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan sumber daya material serta alat yang digunakan dalam pengerjaan jalan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan Mulyadi selaku ulu-ulu (kasih pembangunan dan kemakmuran), berikut hasil wawancara :

“Untuk material sudah di belanjakan oleh pemerintah desa kemudian untuk alat masyarakat yang menyediakan, dana pengadaan alat bersumber dari HOK upah kerja yang diterima masyarakat, karena mereka yang mengerjakan Pembangunan jalan. selain itu juga jika tidak ada alat yang dimiliki oleh masyarakat dalam menunjang Pembangunan jalan maka masyarakat berinisiatf untuk menyewa alat, contohnya seperti excavator yang digunakan untuk pengerjaan jalan di daerah perbukitan” (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2025)

Gambar 3. 8
Alat Dalam Pembangunan Jalan



Sumber : Data Peneliti, 2025

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk sumber daya material dan alat yang digunakan dalam pengerjaan jalan yang

digunakan, khusus untuk material sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa, kemudian untuk alat masyarakat sendiri yang menyediakan dengan menggunakan dana HOK upah kerja yang didapat masyarakat sebagai pelaksana pembangunan jalan. Selain itu apabila jika tidak ada alat yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat berinisiatif untuk menyewa alat tersebut, seperti excavator yang disewa untuk pembangunan jalan di daerah perbukitan.

Hal Senada disampaikan oleh Sarwedi selaku kasih perencanaan, berikut hasil wawancara :

“Material sendiri pemerintah desa yang membelanjakan mulai dari semen sampai, batu split untuk mencukupi Pembangunan jalan yang sudah direncanakan dan ditetapkan melalui musrembag desa, namun untuk alat disediakan oleh masyarakat yang berwenang dalam pengerjaan jalan dengan gotong royog, pemerintah desa juga menyediakan fasilitas alat yang dimiliki untuk membangun jalan. Jika pemerintah desa dan masyarakat tidak memiliki alat yang dibutuhkan maka masyarakat menyewanya, seperti molen cor (wawancara pada tanggal 7 Februari 2025).

Gambar 3. 9
Material Dalam Pembangunan Jalan

Belanja Modal Jalan - Bahan Baku Material			
1. Sirta	PBP	18.00 m3	85,110,000.00
2. Pasir	PBP	48.00 m3	4,750,000.00
3. Split	PBP	56.00 m3	13,200,000.00
4. Semen	PBP	300.000.00	16,800,000.00
	PBP	608.00 Zak	46,360,000.00

Sumber : Data Peneliti, 2025

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah desa sendiri yang membelanjakan material yang diperlukan dalam pembangunan jalan, mulai dari semen, sampai dengan batu split.

Namun untuk alat sendiri masyarakat yang menyediakan baik itu milik pribadi masyarakat ataupun membelinya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, selain itu masyarakat juga melakukan sewa alat seperti molen cor. Walaupun alat dalam pembangunan jalan seharusnya masyarakat yang menyediakan, tetapi pemerintah desa juga ikut andil dalam memberikan fasilitas alat yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk digunakan oleh masyarakat.

Hal senada disampaikan Bapak Sarjun selaku masyarakat, berikut hasil wawancara :

"Pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi berbentuk corblok *full* yang menggunakan material atau bahan seperti semen, pasir, dan batu split kemudian untuk alat yang di gunakan itu bego atau excavator biasanya disewa oleh masyarakat untuk membuka jalan secara khusus jalan yang akan di bangun di daerah perbukitan yang sulit dikerjakan gotong rotong karena akan memakan waktu lama, molen cor untuk mengaduk semen secara efisien ini juga disewa masyarakat, yang dari swadaya masyarakat langsung seperti gerobak angkong nanti ini untuk mengangkut perpindahan material, ada ember untuk wadah semen atau hasil cor yang akan di aplikasikan ke pembentukan jalan, ada sekop dan reskam untuk meratakan corblok dan yang terakhir talang dari seng ini di buat masyarakat sendiri digunakan untuk pembangunan jalan yang sulit di daerah perbukitan jadi nanti di cor di atas bukit nanti di turunkan melalui talang yang mengalir perlahan ke jalan yang dibangun". (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang di lakukan oleh pemerintah kalurahan Triwidadi berupa corblok *full*, untuk material yang di perlukan berupa semen, pasir, dan batu split dan selanjutnya alat yang diperlukan berupa excavator dan peralatan tukang. Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pekerjaan pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit

dikerjakan secara manual oleh masyarakat Sumber daya matrial dan alat dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah semen, pasir, dan batu split sebagai matrial yang digunakan dan bego (excavator), molen cor, gerobak angkong, ember, sekop, reskam, dan talang seng adalah sebagai alat yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dimana excavator digunakan untuk membuka jalan yang sulit seperti didaerah perbukitan yang disewa masyarakat kemudia molen cor sebagai pengaduk yang juga disewa dan talang dari seng untuk menurunkan hasil cor-an tersebut ke daerah turunan perbukitan.

Hal senada disampaikan oleh Anom selaku masyarakat, berikut hasil wawancara :

“Matrial yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dari anggaran dana yang ada, jadi itu sudah di belanjakan dan sudah dalam bentuk matrial fisik, kemudian untuk alat yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan berasal dari swadaya masyarakat, dan dana upah kerja HOK untuk dibelikan alat, selain itu beberapa alat ada juga yang disewa”. (Wawancara pada tanggal 13 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan, matrial yang digunakan sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa dalam bentuk matrial fisik, selanjutnya untuk alat yang digunakan dalam pembangunan jalan bersumber dari swadaya masyarakat melalui serta dana HOK upah kerja masyarakat untuk dibelikan alat. Selain itu juga masyarakat sebagai pelaksana pembangunan jalan juga menyewa alat berat seperti molen cor guna mempercepat proses pengerjaan.

Hal senada disampaikan oleh Azis selaku masyarakat, berikut hasil wawancara :

“Material dalam Pembangunan infrastruktur jalan sudah disediakan oleh pemerintah desa namun untuk alat nya sendiri pemerintah desa menyerahkan kepada masyarakat selaku pelaksana dalam pengerjaan jalan, jika tidak ada alat yang dimiliki warga untuk keperluan pembangunan jalan maka, masyarakat menyewanya untuk mempercepat proses pengerjaan sesuai target yang ditrtukan”. (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk material sudah disediakan oleh pemerintah desa seperti batu, pasir semen dan material lain, kemudian untuk alat pemerintah desa menyerahkan kepada masyarakat selaku pelaksana pembangunan jalan sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiliki alat yang dibutuhkan maka dilakukanlah penyewaan guna mempercepat proses pengerjaan jalan yang ada.

Dari hasil wawancara dan dengan Mulyadi selaku ulu-ulu (kasi pembangunan dan kemakmuran), Sarwedi selaku kasi perencanaan, Sarjun selaku masyarakat, Anom selaku masyarakat, dan abdul Azis selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa matrial dan alat yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus unruk material sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. Selanjutnya alat yang diperlukan berupa, gerobak angkong, ember, sekop, reskam, dan talang seng adalah sebagai alat yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan excavator dan peralatan tukang. Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pegerjaan

pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara manual. Menurut peneliti pemerintah desa sudah berusaha untuk mengatur dan mengurus ketersediaan material dalam pembangunan jalan yang dikerjakan oleh masyarakat namun untuk sumber daya alat pemerintah desa seharusnya juga ikut andil dalam penyediaan alat tidak hanya material saja,

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa untuk sumber daya dalam pembangunan infrastruktur yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya material dan alat. Dalam hal sumber daya manusia (SDM), masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong, di setiap padukuhan yang mendapatkan jatah pembangunan, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh tim pembangunan jalan dan pemerintah desa. Selanjutnya material dan alat yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus untuk material sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. Selanjutnya alat yang diperlukan berupa, gerobak angkong, ember, sekop, reskam, dan talang seng molen, excavator atau peralatan tukang adalah sebagai alat yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pekerjaan pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara manual. Dari penjelasan diatas peneliti berpendapat pemerintah sudah mengatur dan mengurus sumber daya dalam pembangunan infrastruktur

jalan demi untuk kemajuan insfrastruktur di desa terutama di padukuhan guna mepermudah mobilisasi warga dalam berkendara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai strategi Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Isitimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan berbagai informan dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah desa sudah menetapkan lingkungan titik jalan yang dibangun melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud penentuan titik-titik lokasi pembangunan jalan yang urgen dibangun menjadi kebutuhan mendesak dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan batasan waktu selama 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan atau sesuai jangka waktu target pelaksanaan dalam satu tahun yang sudah ditetapkan dalam pengerjaan jalan dari maret sampai oktober dan untuk awal bulan januari dan februari untuk siklus perencanaan desa kemudia akhir tahun di bulan november dan desember digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan), kemudian untuk volume, tebal jalan 12 cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan jalan lebar, panjang jalan yaitu lebar jalan yang dibangun 2,5 meter cm dengan panjang 80 meter, 100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan yang di bangun dengan jenis jalan yang di bangun adalah corblok *full*. Jalan yang dibangun sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu untuk memastikan jalan masuk dalam patokan, namun ditemukan dalam penetapan lingkungan jalan yang dibangun adanya lahan

warga yang terkena dalam pembangunan bahwasannya ada yang setuju jalan tetap dibangun dan ada juga yang tidak setuju karena adanya tanaman di lahan tersebut. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasannya dalam penetapan lingkungan dan batasan waktu dalam pembangunan jalan pemerintah desa Triwidadi sudah mengatur lingkungan yang akan dibangun jalan dengan batasan waktu dan volume yang sudah ditetapkan dalam musrenbang. Pemerintah desa Triwidadi juga melindungi warganya dengan melakukan musyawarah untuk mufakat seperti permasalahan penetapan lokasi pengerjaan jalan yang masuk dalam lahan warga.

Tindakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah desa sudah berusaha mencari berbagai sumber pendanaan baik itu dari luar, maupun dana yang didapat dari pusat berupa dana desa. Berikut sumber dana dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 316.394.000 juta, PBK kabupaten dan provinsi sebesar Rp 980.000.900, BKK DAIS sebesar Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendapatan diatas berjumlah Rp 1.471.395.800 miliar. Selanjutnya untuk mendapatkan dana dari luar pemerintah melibatkan warga melalui reses dewan secara khusus yang memegang Triwidadi, dimana masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk dibangun jalan. Kemudian untuk penggunaan anggaran dana yang ada tidak di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melainkan sudah dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan

dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja. Berikutnya untuk permasalahan lahan yang terkena pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum masyarakat, permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalannya rusak berat. Sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa. Dari pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa pemerintah kabupaten Triwidadi sudah mengurus kebutuhan warganya berupa pembangunan jalan di padukuhan-padukuhan dengan mencari sumber pendanaan baik itu dari dana desa, atau bantuan PBK kabupaten/provinsi dan reses dari DPRD setempat. Namun pembangunan jalan belum dilakukan secara merata di semua padukuhan karena pemerintah desa mengutamakan pembangunan jalan berdasarkan skala prioritas. Dalam hal ini peran pemerintah yang melayani warganya belum dilakukan secara optimal.

Sumber daya dalam pembangunan infrastruktur yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya material dan alat. Untuk hal sumber daya manusia (SDM), masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan.

Selanjutnya sumber daya material dan alat yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus untuk material sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. Selanjutnya alat yang diperlukan berupa gerobak angkong, ember, sekop, reskam, dan talang seng, excavator molen cor dan peralatan tukang. Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pekerjaan pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara manual. Dari pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa untuk sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah kalurahan Triwidadi sudah mengatur bagaimana pembangunan tersebut dapat dikerjakan bersama masyarakat dalam rangka pemberdayaan guna menyerap tenaga kerja dari dalam kalurahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun untuk melihat berjalan dengan baik atau tidak strategi pemerintah desa dalam Pembangunan insfrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dapat dilihat melalui :

1. Penetapan Lingkungan, dan Batasan waktu Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pemerintah desa sudah menetapkan lingkungan jalan yang dibangun melalui musrembang, yang sebagaimana dimaksud penentuan lokasi jalan yang dibangun yaitu Padukuhan Jambean RT 3, Padukuhan Pajangan RT 1, Padukuhan Ngincep RT 6, Padukuhan Butuh Lor RT 2, Padukuhan Polaman RT 2, Padukuhan Butuh Kidul RT 1 dan 2, Padukuhan Nanggul RT 5, Padukuhan kalisoko RT 4, Padukuhan Gemping RT 2, dan Padukuhan Kayuwan Wetan, Padukuhan Jojoran Kulon RT 5, Padukuhan Jojoran Wetan RT 3, Padukuhan Pajangan RT 3, Padukuhan Naggul RT 3, Padukuhan Sabrang Lor RT 2, Padukuhan Kersan RT 4, Padukuhan Kaduresan RT 5, Padukuhan Plambongan RT 4, Padukuhan Guwo RT 2, Padukuhan Blabak RT 2, Padukuhan Ngincep RT 2, dan Padukuhan Kayuwan Kulon RT 4. Pembangunan jalan yang urgen dibangun menjadi kebutuhan mendesak dengan batasan waktu selama 1-2 minggu pertitik pembangunan jalan atau sesuai jangka waktu target pelaksanaan dalam satu tahun, dari maret sampai

oktober dan untuk awal bulan januari dan februari untuk siklus perencanaan desa kemudia akhir tahun di bulan november dan desember digunakan untuk membuat laporan akhir tahunan LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan), kemudian untuk volume, tebal jalan 12 cm-15 cm sesuai dengan karakter tanah pada lingkungan pengerjaan jalan lebar, panjang jalan yaitu lebar jalan yang dibangun 2,5 meter cm dengan panjang 80 meter, 100-150 meter, dan 200-300 meter menyesuaikan dengan jalan yang di bangun dengan jenis jalan yang di bangun adalah corblok full. Jalan yang dibangun sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu untuk memastikan jalan masuk dalam patokan, namun ditemukan dalam penetapan lingkungan jalan yang dibangun adanya lahan warga yang terkena dalam pembangunan bahwasannya ada yang setuju jalan tetap dibangun dan ada juga yang tidak setuju karena adanya tanaman di lahan tersebut.

2. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan insfrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi bersumber dari APBDesa terdiri dari dana desa sebesar Rp. 316.394.000 juta, PBK kabupaten dan provinsi sebesar Rp 980.000.900, BKK DAIS sebesar Rp 175.000.000 total anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Triwidadi dari 3 (tiga) sumber pendaaan diatas berjumlah Rp 1.471.395.800 miliar. Selanjutnya untuk mendapatkan dana dari luar pemerintah melibatkan warga melalui reses dewan secara khusus yang memegang Triwidadi, dimana masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk dibangun jalan. Kemudian untuk penggunaan anggaran dana yang ada tidak

di berikan secara tunai untuk pembangunan infrastruktur jalan melainkan sudah dalam bentuk fisik matrial sebagai bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan terkecuali 10% dari dana sudah dianggarkan dalam bentuk tunai untuk HOK upah tenaga kerja. Berikutnya untuk permasalahan lahan yang terkena pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan komunikasi kemudian di musyawarakan dalam forum masyarakat, permasalahan pembangunan insfrastruktu jalan yang belum merata dilakukan di semua padukuhan disebabkan karena adanya skala prioritas pembangunan diutamakan di daerah padukuhan yang jalanya rusak berat. sehingga memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat dan merasa hanya Pedukuhan tertentu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan secara khusus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah desa.

3. Sumber Daya Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sumber daya dalam pembangunan insfrastruktur yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya material dan alat. Dalam hal sumber daya manusia (SDM), masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan insfrastruktur jalan dengan melaksanakan gotong royong, walaupun dikerjakan secara gotong royong tetapi tetap berpedoman terhadap SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya sumber daya matrial dan alat yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan khusus unruk material sudah dibelanjakan oleh pemerintah desa berupa semen, pasir, dan batu split. Selanjutnya alat yang diperlukan berupa , gerobak angkong, ember, sekop, reskam, dan talang seng, excavator, molen cor dan peralatan tukang.

Untuk excavator sendiri disewa oleh masyarakat, khusus untuk pekerjaan pembangunan jalan di daerah perbukitan karena sulit dikerjakan secara manual.

Dari penelitian ini menghasilkan temuan berupa fakta yang direfleksikan menggunakan teori geoff Mulgan dan salusu tentang strategi pemerintah dengan menggunakan 3 (tiga) indikator : penetapan lingkungan, dan batasan waktu, tindakan pemerintah, sumber daya, yang memuat aspek mengatur, mengurus, melindungi dan melayani. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Isitimewa Yogyakarta, sudah dilakukan walaupun pembangunan jalan belum merata dilakukan di semua padukuhan, kemudian ada permasalahan lahan yang terdampak pembangunan jalan dan anggaran yang terbatas tetapi pemerintah desa berusaha mengatur, mengurus, melayani dan melindungi masyarakatnya agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik dan berdampak terhadap kemajuan Kalurahan Triwidadi dengan melibatkan peran serta masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dibahas dalam analisis pada bab di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Triwidadi perlu lebih cermat lagi untuk menetapkan lingkungan atau lokasi jalan yang dibangun dan melihat kebutuhan

masyarakat Triwidadi di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan tidak memberikan kebutuhan infrastruktur lainnya yang belum urgensi, Pemerintah Desa juga harus berlaku adil dalam pembangunan infrastruktur jalan pada setiap padukuhan dan tidak berpihak pada beberapa padukuhan saja untuk di bangun jalan baik dalam hal mencari sumber dana, pemerintah desa harus pandai baik kebutuhan pokok dalam pembangunan infrstruktur jalan seperti alat berat di masukan dalam perencanaan dan anggaran agar masyarakat tidak lagi yang swadayakan sehingga HOK upah tenaga kerja sesuai dengan kegunaannya.

2. Bagi penelitian selanjutnya bisa lebih dalam lagi meneliti Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi terutama pembangunan jalan-jalan dalam semua padukuhan di Kalurahan Triwidadi untuk melihat dan mengambarakan seperti apa perbuatan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Karya Ilmiah

- Adam Latif, Muhamad Rusdi, dan Dedi Setiawan, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1, Februari 2020. (diakses 15 Oktober 2024)
- Dhimas Ilham Prasetya, Ida Nuraini, dan Hendra Kusuma, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya Listrik Terhadap PDRB Di Kota Mojokerto*, Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Volume 5, Nomor 2, Mei 2021, pp. 233-246. (diakses 15 Oktober 2024)
- Eva Monica, Gili Argenti, dan Prilla Marsingga *Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rencaasih Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang*, Jurnal Ilmu sosial, Politik dan Humaniora, /Volume 6, Nomor 2, Agustus 2022, P-ISSN : 2548-5067 E-ISSN : 2598-6236. (diakses 20 Oktober 2024)
- Firda Auliyah Anggraeni, *Analisis Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 3, Desember 2022, E-ISSN : 2827-8372 P-ISSN : 2827-8346 <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Jebaku> (diakses 22 Oktober 2024)
- Fitria Ramdana, Jaelan Usman, dan Ansyari Mone, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Kampung Sabbeta Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 2, Nomor 5, Oktober 2021. (diakses 26 Oktober 2024)
- Hadisman Gea, Remuli Karo karo, dan Wati Marni Lase *Strategi Pemerintah Untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Hilimbowo Kecamatan Ulugowo*, Jurnal Governance Opinion, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2023. (diakses 26 Oktober 2024)
- Heppy Sondakh, Michael Mantiri, dan Ventje Kasenda, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Governance, Volume 1, nomor 2012, ISSN : 2088-2815. (diakses 28 Oktober 2024)
- Kasmira, Alias, dan Sudarmin, *Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabuoaten Gowa*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 3, Desember 2020

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index> (diakses 28 Oktober 2024)

Miko Nugroho dan Eny Kusdarini, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JIPPK, Volume 4, Nomor 1, Juni 2019, ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk> (diakses 29 Oktober 2024)

Mustafa, dan Cahyo Sasmito, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik JISIP, Volume 6, Nomor 3, 2017, ISSN. 2442-6962. (diakses 1 November 2024)

Muthia Zahra Farhati, Angeli Saraswati, Muhammad Prayoga Septina, Muhammad Ramadhan, Euis Salbiah, Cecep Wahyudin, *Strategi Pengembangan Organisasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai*, Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2024. (diakses 30 November 2024)

Nihla, Nursam, abd. Kahar, dan Arfan, *Strategi Pemerintah Desa Mendukung Pembangunan Jalan Di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli*, Jurnal Sektor Publik, Volume 1 Nomor 1, Juni 2024. (diakses 1 November 2024)

Putri Ester Haloho, Hanny Purnamasari, dan Lina Aryani *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kartamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 6, Nomor 4 November 2022, e-ISSN:2656-6753,p-ISSN:2598-9944 DOI:10.36312/jisip.v6i4.3766/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>. (diakses 3 November 2024)

Sutoro Eko Yunanto, *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*, Jurnal Governabilitas, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-41569. (diakses 4 November 2024)

Wahyu Kurniawan, dan Karjuni Dt. Maani, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2019, ISSN : 2684-818X(Online), ISSN : 2338-7378 (Print), <http://jmiap.ppj.unp.ac.id> (diakses 6 November 2024)

Yoga Hariyanto, Shulis, dan Figur, Adhiyakam, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Volume 12, Nomor 1, April 2021, E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx. (diakses 6 November 2024)

Buku

Stephen Cook, berjudul *Rulling But Not Governing*, 2007. (diakses 4 November 2024)

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. B Alfabeta. (diakses 6 November 2024)

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Mum2EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA146&dq=Marrus+2018+pengertian+strategi&ots=WlqAQvgSKU&sig=MC1FMC6ZnE8bc8PcIkag-LEh4g4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (diakses 6 November 2024)

Internet

<https://triwidadi.bantulkab.go.id/first> (diakses 6 November 2024)

<https://www.google.com/search?q=menurut+KBBI+dokumentasi+adalah&oq=menurut+KBBI> (diakses 7 November 2024)

<https://www.tempo.co/politik/apa-itu-infrastruktur-ini-pengertian-jenis-fungsi-dan-manfaatnya-85090> (diakses 7 November 2024)

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015

LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan

A. Penetapan Lingkungan, dan Batasan Waktu Dalam Pembangunan

Infrastruktur Jalan

1. Bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, lokasi titik dimana saja yang dibangun Jalan?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur jalan?
3. Berapa lebar, panjang dan tebal volume jalan serta jenis jalan yang dibangun?
4. Bagaimana pembangunan infrastruktur jalan yang masuk diwilayah lingkungan warga?

B. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

1. Bersumber dari mana saja anggaran yang ada untuk pembangunan infrastruktur jalan?

2. Bagaimana tindakan Pemerintah Desa mendapatkan dana bantuan dari luar untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan?
3. Bagaimana penggunaan anggaran yang ada untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan?
4. Bagaimana tindakan Pemerintah Desa untuk penyelesaian masalah Pembangunan Infrastruktur Jalan yang mengenai perakaran warga atau lahan milik warga?
5. Bagaimana tindakan pemerintah desa terhadap Padukuhan yang belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan?

C. Sumber Dalam Daya Pembangunan Infrastruktur Jalan

1. Bagaimana penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur Jalan, apakah dikerjakan dengan gotong rotong?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan?
3. Apa saja material dan alat yang dibutuhkan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan?
4. Bagaimana penggunaan alat berat, apakah digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan yang sulit diakses?

2. DAFTAR OBSERVASI

No	Uraian Pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Kantor Kalurahan	√		Kondisi kantor Kalurahan bagus, yang berada di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Struktur Organisasi Desa	√		Ada
3.	RPJMKal	√		Ada
4.	APBKal	√		Peraturan Desa Triwidadi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
5.	Website Kalurahan	√		https://triwidadi.bantulkab.go.id

3. BUKTI DOKUMENTASI DAN WAWANCARA INFORMAN



**Wawancara Dengan Bapak Abdul Rohman
Ketua LPMK Kalurahan Triwidadi**



**Wawancara Dengan Bapak Mulyadi
Kasi Ulu-ulu Kalurahan Triwidadi**



**Wawancara Dengan Bapak Slamet Riyanto
Lurah Kalurahan Triwidadi**



**Wawancara Dengan Bapak Endung Dasuki
Tim Teknis Pelaksana Pembangunan Jalan**



**Wawancara Dengan Bapak Irwan Staff Kalurahan Triwidadi
Selaku Bidang Teknis Pelaksana Pembangunan**



**Wawancara Dengan Bapak Sarwedi Pangripta
Kalurahan Triwidadi**



Wawancara Dengan Ibu Anita Carik Kalurahan Triwidadi



Wawancara Dengan Bapak Anom Masyarakat Kalurahan Triwidadi



**Wawancara Dengan Bapak Sarjun Masyarakat
Kalurahan Triwidadi**



**Wawancara Dengan Ibu Winarni Masyarakat
Kalurahan Triwidadi**



**Wawancara Dengan Bapak Abdul Azis Masyarakat
Kalurahan Triwidadi**



**Dokumentasi Proses Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kalurahan Triwidadi**



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 561971, 550775 Fax (0274) 515989

Nomor : 053/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dra. B.Hari Saptaning Tyas, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Zefora
No. Mahasiswa : 21520032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi



Dr. Gegerius Sahdan, S.IP., M.A



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 7/IT/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Zefora
Nomor Mahasiswa : 21520032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Sasaran : Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Januari 2025
Ketua

Doro Eko Yunanto
NID. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 9/I/U/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Zefora
No Mhs : 21520032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat : Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Januari 2025
Ketua

Dianthoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
KALURAHAN TRIWIDADI
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦿꦶꦮꦢꦢꦶ

Jl. Kayuhan-Sudimoro, Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Website: <http://www.desa.triwidadi.bantulkab.go.id> e-mail : desa.triwidadi@bantulkab.go.id

Nomor : 000.9.6.3/00006
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua STPMD APMD Yogyakarta
Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari STPMD APMD Yogyakarta Nomor : 9/1/U/2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi. Dengan ini Kami Lurah Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul memberikan ijin penelitian kepada :

Nama : **ZEFORA**
NIM : 21520032
Program Study : Ilmu Pemerintahan (S1)
Tema/Judul TAS : Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta.
Lokasi : Kalurahan Triwidadi
Waktu : Januari-Februari 2025

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Triwidadi, 13 Januari 2025

Lurah Triwidadi





Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondosuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : Zefora

Judul Makalah: Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Di Kalurahan Triwidadi,
Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah
Isitimewa Yogyakarta

Tanggal pemeriksaan: 30 April 2025

Persentase plagiasi: 10 %



Petugas: Checked By:

Wiji Astuti

